

PENGEMBANGAN PROTOKOL PENGENDALIAN PENGANGGURAN AKIBAT KRISIAL'08 UNTUK PENCEGAHAN PEMISKINAN

*Lala M. Kolopaking, Lisna Y. Poeloengan, Mohammad Iqbal Banna dan
Fredian Tonny Nasdian*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah hal baru. Dalam sejarah Indonesia, ketenagakerjaan masih menjadi persoalan berkepanjangan, bahkan dapat disebut terus berada pada kondisi krisis---*employment crisis*. Pengalaman menghadapi Krismon'97/98 menunjukkan bahwa krisis tersebut lalu meluas menjadi krisis multi-dimensi karena mencakup tidak saja krisis ekonomi, tetapi juga krisis politik, keamanan, pemerintahan, hukum, kepercayaan, sosial, bahkan krisis mora! (*moral hazard*) dan menyurutkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga memperparah krisis ketenagakerjaan. Krisis ekonomi dan krisis sosial memperparah krisis ketenagakerjaan (dengan dua indikasi yang saling berkait: pengangguran dan kemiskinan). Krismon'97/98 juga menunjukkan bahwa krisis ketenagakerjaan yang semakin serius berpotensi menyebabkan keterpurukan masyarakat Indonesia dan juga mengancam bangsa Indonesia semakin tertinggal dibanding bangsa-bangsa lainnya. Hal ini karena krisis ketenagakerjaan dapat memicu krisis sosial seperti meningkatnya jumlah kematian khususnya pada bayi dan balita, meningkatnya kriminalitas, penggunaan narkoba, depresi, bunuh diri, perceraian dan masalah-masalah demoralisasi lainnya.

Hal yang kemudian perlu diwaspadai dalam konteks kekinian adalah Krisial'08. Krisis tersebut juga potensial berdampak terhadap kondisi krisis ketenagakerjaan. ILO memperkirakan imbas Krisial'08 akan menyebabkan pengangguran di Indonesia pada tahun 2009 bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau mengalami kenaikan sekitar 9%. Hal ini disebabkan oleh adanya PHK dari beberapa sektor usaha. Sektor ekspor - impor yang dicatat telah melakukan PHK sebanyak 15.000 orang pada 2008 lalu, kembali akan melakukan PHK pada tahun

2009 ini. Diperkirakan juga sektor tekstil akan melakukan PHK terhadap sekitar 14.000 orang dan sektor furnitur dan kerajinan sebanyak 35.000 orang. Belum lagi, potensi PHK akan terjadi pada sektor tenaga kerja migran, misalnya Malaysia akan memecat 300.000 tenaga kerja migran yang tentunya akan mempengaruhi pasar tenaga kerja migran dari Indonesia. Selain itu, ancaman PHK juga terjadi di negara-negara lain yang menjadi negara tujuan tenaga kerja migran Indonesia lain, seperti Korea dan Taiwan. Para tenaga kerja migran ini diperkirakan akan pulang ke Indonesia dan menjadi pengangguran di daerah asal.

Potensi peningkatan jumlah pengangguran akibat Krisial'08 memang perlu diwaspadai. Namun, yang penting dalam kaitan Krisial'08, prosesnya perlu dipahami berbeda dibanding dengan Krismon'97/98. Sekarang ini Krisial'08 tidak hanya berdampak negatif terhadap sektor padat modal, melainkan juga padat karya. Indikasinya, krisis tidak hanya memukul sektor produksi yang tidak diperdagangkan seperti perbankan dan keuangan. Akan tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor yang memuat hal-hal yang diperdagangkan seperti manufaktur, maupun tekstil dan produk tekstil. Dampak ini terutama dirasakan oleh sektor yang berorientasi ekspor. Kondisi ini semakin parah lantaran fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam mengatasi gangguan juga semakin diragukan. Akibatnya, banyak perusahaan, terutama yang berorientasi ekspor, tidak memperpanjang kontrak pekerja. Dampak lanjutannya adalah pengurangan jumlah pekerja dan akan terjadi penyempitan penyediaan lapangan kerja baru pada sektor-sektor formal. Lonjakan jumlah pengangguran ini diperkirakan akan meningkatkan angka kemiskinan nasional.

Bercermin dari pengalaman tersebut, maka menghadapi Krisial'08 diperkirakan krisis ketenagakerjaan khususnya pengangguran dan kemiskinan dapat berada pada kondisi "bahaya". Artinya, kondisi ini tanpa pelaksanaan agenda penanganan yang baik akan rawan menimbulkan ledakan sosial. Oleh karena pada tahun 2009 juga ada pertarungan politik untuk pemilihan umum legislatif dan presiden. Belum lagi, sebagaimana telah disebut, Krisial'08 ini berbeda perilaku dampaknya dengan Krismon'97/98. Artinya, pemerintah dalam hal ini perlu secara benar-benar melangkah dengan terfokus, terukur dan terjadwal menangani dampak Krisial'08. Malahan, bukan itu saja, kondisi seperti saat ini perlu dijadikan landasan pembelajaran menemukan kebijakan baru ketenagakerjaan yang utuh dan berpihak kepada rakyat banyak (Bhargwati, 1991 dan Bernhard, 2003).

Berdasar uraian di atas, kajian ini berfokus menelaah masalah dan upaya dalam mengantisipasi laju pengangguran akibat PHK dengan mempertimbangkan perbedaan pengaruh Krisial'08 terhadap perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Kajian juga menelaah kebijakan yang dapat menjadi landasan

pengembangan sistem ketahanan sosial yang dinilai mampu melindungi individu dan keluarga dari dinamika perubahan yang berpotensi menciptakan pemiskinan. Prosesnya juga diharapkan mampu membangun partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat, serta mampu mengelola sumberdaya alam dan sosial. Hal yang kemudian diharapkan menjadi langkah untuk mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik, membangun rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian semua pihak terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membendung potensi ancaman yang dapat berkembang menjadi krisis multi-dimensi jilid kedua.

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia belum pernah diselesaikan secara integral dan mendasar yaitu menyangkut pendidikan SDM (Tabel 5.1). Program non-formal dan informal seperti pelatihan, penyuluhan dan magang masih perlu ditingkatkan agar pengangguran terbuka dapat dikurangi. Pada tahun 1999 pengangguran terbuka 6,4% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 5,1% dan 67,6%. Penduduk berusia 15 tahun ke atas naik 19,3% dan angkatan kerja naik 19,9% dari tahun 1999. Semua parameter ini menandakan diperlukannya upaya khusus penanggulangan pengangguran baik pada kondisi normal, terlebih lagi dalam situasi krisis dimana terjadi banyak krisis.

Tabel 5.1. Situasi Angkatan Kerja Indonesia (%)

No	Keterangan	Perkotaan	Perdesaan	Indonesia
1	Tidak sekolah	1,9	7,3	5,1
2	Tidak selesai pendidikan dasar 9 tahun	30,5	57,2	46,0
3	Pendidikan dasar 9 tahun	19,7	18,9	19,3
4	Pendidikan menengah 12 tahun	35,4	13,5	22,7
5	Perguruan tinggi	12,5	3,1	7,0
Total (Juta Jiwa)		47,7	66,1	113,7

Sumber: Sakernas, 1995

Tujuan

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka paling tidak ada tiga tujuan kajian yang akan dilakukan, yaitu:

- Menganalisis dampak Krisis'08 terhadap pengangguran yang akan memperburuk krisis ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan perbedaan besaran dampak yang terjadi antar daerah.

- Mengidentifikasi akibat krisis ketenagakerjaan dalam pengembangan peluang usaha dan bekerja di pedesaan.
- Merumuskan protokol manajemen krisis untuk perekayasa katup pengaman (*safety valve*) melalui pengembangan sistem padat karya dan pengembangan peluang-peluang usaha dan bekerja di pedesaan, serta penguatan kelembagaan komunitas daerah asal TKI berbasis pemberdayaan TKI purna untuk menghindari kondisi yang memperparah krisis ketenagakerjaan dan juga menetapkan arah solusi didalam kebijakan ketenagakerjaan untuk melakukan restorasi krisis ketenagakerjaan akibat Krisial'08.

METODE PENELITIAN

Kajian berkenaan dengan ketenagakerjaan yang dikaitkan dalam kemiskinan merupakan penelaahan strategis. Oleh karena ketersediaan peluang kerja dan berusaha merupakan faktor penentu tingkat pendapatan yang pada akhirnya menentukan kesejahteraan.

Selama tahun 1993-1994, melalui sejumlah penelitian yang dilakukan PSP yang saat ini menjadi PSP3, diketahui beragam aspek kebijakan-kebijakan untuk pengembangan peluang kerja dan berusaha, khususnya di pedesaan. Misalnya, aspek struktur agraria, pembentukan dan pemusatan modal (*capital formation*), industrialisasi pedesaan, migrasi tenaga kerja dan perempuan bekerja menjadi subjek telaah. Temuan-temuan yang perlu dicermati dalam hal ini adalah meruncingnya ketimpangan struktur penguasaan tanah yang pada gilirannya menciptakan bentuk-bentuk pemusatan kapital dalam bentuk lahan pertanian. Mulailah kemudian terbentuk "polarisasi sosial" yang memunculkan golongan "petani kapitalis" pemilik sawah luas dan "buruh tani" tuna kisma. Mendasarkan pada data berbagai Sensus Pertanian, sejak 1973 hingga 1993, kajian juga melihat semakin nyatanya penguasaan tanah yang makin timpang tersebut. Angka rata-rata luas usaha tani menunjukkan gejala polarisasi dengan adanya peningkatan luasan usaha tani pada lapisan kurang dari 2 ha, dan penurunan rata-rata luasan usaha tani petani gurem (kurang dari 0,5 ha) menurun tajam dari 0,26 ha menjadi 0,17 ha. Perhitungan yang lebih spesifik berdasar data Sensus Pertanian 1993 menunjukkan bahwa 69% luas tanah pertanian dikuasai oleh hanya 16% petani, sedangkan 84% petani lainnya berbagi sisa lahan yang ada dan membentuk golongan petani gurem berlahan 0,1 - 0,5 ha.

Modernisasi pertanian kemudian diketahui menjadi sebab gejala marginalisasi petani. Sajogyo (1982), secara jitu memberi label atas gejala tersebut sebagai

modernization without development. Pangkal penyebab “guremisasi” ini adalah biaya intensifikasi yang tinggi sehingga hanya petani kaya berlahan luas yang mampu mendanainya pada “skala ekonomi”. Sedangkan petani gurem, karena keterbatasan modal, tidak mampu membiayai program intensifikasi yang bersifat “komando” tersebut, sehingga pilihan rasional bagi mereka adalah mengalihkan penguasaan sebagian atau seluruh lahannya kepada petani besar, baik secara temporer maupun permanen. Marjinalisasi atau guremisasi diperparah oleh proses industrialisasi yang bersifat eksklusif. Prosesnya tidak bersambung dengan pertanian, namun justru mendorong konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri/pemukiman dalam laju tinggi (PSP3-LPPM-IPB, 2004). Akhirnya dalam perkembangannya, komersialisasi melalui industri padat modal ke pertanian dan pedesaan hanya menambah jumlah petani gurem dan buruh tani, serta menambah persoalan ketersediaan peluang kerja di pedesaan. Perkembangan ini menjadi sebab petani di Jawa (jumlah petani terbesar) dalam mempertahankan kesejahteraannya sudah semakin bergantung kepada pendapatan yang berdasarkan kegiatan upahan. Dalam kerangka demikianlah kemudian permasalahan peluang kerja di sektor pedesaan dipetakan: pesatnya laju pertambahan jumlah petani gurem, semakin sempitnya luasan rata-rata lahan pertanian dalam satuan individu, muncul dan semakin terbentuknya golongan buruh tani upahan serta yang tidak terlepas juga adalah degradasi kualitas SDA akibat revolusi hijau.

Dalam perkembangan selanjutnya, perlu diperhatikan juga bahwa terbukanya peluang kerja ditentukan pula oleh dinamika permintaan tenaga kerja dari daerah lain. Pembangunan pabrik-pabrik di perkotaan menjadi daya tarik bagi masyarakat pedesaan untuk melakukan urbanisasi. Demikian juga harapan pemerintah melalui pemusatan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri—pembuatan pabrik-pabrik dan sarana pendukungnya, diharapkan akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, menambah penghasilan kemudian pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan, skema yang dikenal sebagai *trickle down effect*. Namun hal yang dilupakan pemerintah adalah kualitas SDM yang dibutuhkan agar dapat terikutkan dalam gelombang industrialisasi ini bukanlah kualitas yang umum dimiliki masyarakat pada saat itu. Akibatnya, urbanisasi menjadi rawan menimbulkan pengangguran di perkotaan. Dalam kerangka demikianlah sektor informal tampil menyangga perekonomian masyarakat. Kolopaking (2005), menunjukkan peluang usaha dan kerja masyarakat di sektor informal dapat mengurangi kemiskinan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kajian tersebut menunjukkan juga perkembangan ketenagakerjaan berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan yang menghadapi

perluasan wilayah menjadi perkotaan. Bahkan, dalam menghadapi Krismon'97/98, sektor informal mampu menjadi katup pengaman masyarakat dari proses pemiskinan.

Kajian ketenagakerjaan selanjutnya menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan Indonesia pada dasarnya sudah sejak lama mengenal proses bekerja ke luar daerah tempat tinggalnya. Bahkan, Kolopaking (2000), menunjukkan proses bekerja ke luar daerah tempat tinggalnya tersebut pada dekade 80-an telah menjadikan luar negeri sebagai tujuan bekerja. Saat ini proses tersebut menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang dikenal dengan penempatan TKI di luar negeri. Studi Kolopaking (2000) menyebutkan penempatan TKI ke luar negeri ditentukan oleh permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Satu bukti, penempatan TKW pada dekade 90-an mengalami penurunan ketika terjadi krisis Perang Teluk. Dicatat pada waktu itu jumlah pemberangkatan TKI mencapai titik terendah. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa penempatan TKI akan mengalami penurunan ketika permintaan tenaga kerja dari negara tujuan bekerja akibat terkena Krisial'08. Akibatnya, banyak TKI pulang dan menjadi penganggur di daerah asal. Belum lagi, kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri pun sedang menghadapi masalah karena pengangguran akibat PHK dan usaha-usaha yang mengalami permasalahan karena macetnya kegiatan ekspor.

Kajian terhadap berbagai isu ketenagakerjaan menunjukkan bahwa permasalahan peluang kerja dan masyarakat bekerja tidak dapat dipisahkan antara pedesaan dengan perkotaan, bahkan antara domestik dengan internasional. Berbagai krisis yang terjadi sehingga menghantarkan pada krisis ketenagakerjaan di perkotaan membuat sejumlah besar tenaga kerja terbuang dari perkotaan mencari kerja di pedesaan, khususnya sektor pertanian. Demikian juga krisis perekonomian yang berdampak pada krisis ketenagakerjaan di negara tujuan bekerja dapat berdampak pada pemulangan tenaga kerja asing ke negara asal dan tentunya berpotensi menjadi penganggur di negara asal (Kolopaking, 2003, 2006, 2007).

Menurut Eriyatno (2009), mengendalikan pengangguran akibat Krisial'08 perlu dilakukan bersamaan dengan reorientasi pengembangan ekonomi melalui pemikiran dan cara-cara baru. Artinya, semua pihak sesuai dengan peran masing-masing melakukan aksi berbagai kegiatan bisnis sektor riil. Sejalan dengan pandangan tersebut, sektor riil yang diperkirakan dapat dikembangkan meliputi banyak sektor, seperti sektor agribisnis, *mini market*, konveksi dan pabrik segala kebutuhan hidup keseharian, seperti pabrik susu, pabrik sabun, *shampoo* dan jenis usaha lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hanya saja untuk mengembangkan sektor riil ini diperlukan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait, seperti lembaga perbankan, para akademisi, pengusaha dan

kelompok-kelompok masyarakat (Suparno, 2008; Departemen Perindustrian, 2008 dan Kolopaking, 2009).

Konsekuensi dari pemikiran itu artinya bahwa apabila AS dan negara-negara Eropa menyelesaikan krisis dengan membuka peluang bekerja secara besar-besaran, maka pandangan itu benar tetapi dengan menekankan pada penguatan UMKM. Di dalam konteks ini, seyogyanya diperlukan protokol yang dapat mengarahkan pengembangan sektor-sektor riil, terutama UMKM yang fleksibel, lebih kompetitif, transparan, profesional dan bersifat universal (Godel, 2001; Holtz dan Rosen, 2004 dan Schumacher, 1993). Di pihak lain, proses itu perlu sekaligus digunakan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM dan pola pengelolaan potensi sumberdaya dan ekonomi lokal di dalam suatu sistem penggerak sektor perekonomian yang mengeluarkan masyarakat dari pemiskinan. Penetapan UMKM tersebut juga perlu dijadikan dasar pembangunan secara struktural sebagai satu media juga mengembangkan sistem pandangan yang tidak hanya akan dapat memacu perbaikan perekonomian, tetapi juga mendukung kondisi sosial, politik dan moralitas kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan yang merupakan disiplin ilmu terapan (*policy sciences*) dengan ciri memberi ruang pemanfaatan berbagai metode dan teknik keilmuan dalam menghasilkan informasi yang relevan dan diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik dan atau perumusan sebuah kebijakan publik. Ada dua tataran dalam hal ini yaitu tahapan analisis dan tahapan desain. Dua tahapan ini dalam penelitian kebijakan dapat dipersandingkan maupun dilakukan bersamaan. Terbuka peluang dalam penelitian kebijakan secara partisipatif dua hal itu dilakukan bersamaan atau dalam konteks manajemen perguruan tinggi seperti sekarang ini, yang memisahkan antara kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat, hal itu dalam kegiatan penelitian kebijakan dapat tidak tampak lagi. Oleh karena itu, menurut Heron (1996), metodologi kajian aksi (*action research*) sampai kajian bersama (*human inquiry based research*) dapat juga digunakan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pandangan bahwa penelitian kebijakan adalah sebuah proses kajian kebijakan yang sistematis. Dengan cirinya yang berorientasi pada perumusan sebuah tujuan, berupaya untuk menjawab persoalan spesifik, khususnya tentang mengapa persoalan itu ada dan

bagaimana persoalan itu diselesaikan. Untuk itu, kajian perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati serta secara sistematis. Implikasi prinsip itu akan diterapkan dalam penelitian ini dengan urutan langkah kajian melalui menanyakan persoalan dengan dasar: “apa”, “mengapa”, “bagaimana”, “dimana”, “siapa” dan “kepada siapa” berkaitan dari sebuah persoalan serta “apa tindak lanjutnya” (Eriyatno dan Sofyar; 2007 dan Pierce, 2008).

Adapun tataran kebijakan publik yang dapat dijadikan wahana aplikasi dari sektor ini adalah masuk dalam konteks penjabaran strategi kelembagaan ke arah taktis operasional. Studi ini tidak sampai membuahkan protokol yang memberikan usulan petunjuk teknis, namun kerangka penyusunan SOP untuk setiap strategi ketenagakerjaan dan padat karya terpilih.

Penelitian tentang dampak Krisis'08 terhadap pengangguran yang akan memperparah krisis ketenagakerjaan didekati dengan fokus pada pengembangan protokol manajemen krisis dari dua kegiatan analisis yang saling berkaitan. Pertama, aspek yang bersifat penetapan metodologis (*methodological aspect*). Kedua, aspek yang bersifat substansi (*substantial aspect*)—krisis ketenagakerjaan (yang tidak lepas dari pengangguran, kemiskinan dan pemiskinan). Substansi tentang krisis ketenagakerjaan dianalisis dalam tiga tataran, yaitu makro, sektoral-regional dan mikro. Semua hasil analisis kemudian bermuara pada analisis proses-proses kebijakan untuk pengembangan protokol, pengendalian pengangguran dan krisis ketenagakerjaan akibat dampak Krisis'08.

Protokol dalam tulisan ini dimaknai tidak hanya terbatas pada pengertian prosedur yang sistematis atau langkah-langkah rancangan aksi secara terjadwal, atau sebagai manajemen yang luwes dan berhirarkis, tetapi pengertian itu perlu diperhatikan hanya sebagai “embrio dari prosedur operasi baku”, dalam arti prosedur baku yang tetap. Dengan demikian, menurut Carrico *et al.* (1989), protokol itu dibuat berdasarkan tujuan tertentu yang memperimbangkan dan taat mengikuti perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku serta dilaksanakan tidak untuk selamanya.

Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Kajian dalam pengenalan parameter krisis untuk merancang sistem deteksi dini guna mewaspadaai terjadinya *chaos* akibat krisis ketenagakerjaan dalam pengembangan pertanian dan peluang usaha dan bekerja di pedesaan akan dilakukan dengan beragam teknik, seperti melakukan *desk study* untuk melakukan analisis isi atau *content analysis*, melakukan FGD dan *Discourse and Narrative*

Analysis. Sedangkan pengembangan protokol manajemen krisis menurut Zwicky (1997), menerapkan *Morphology Technique* dan *Nominal Group Technique*. Kajian ini substansi pilihan utama dan semua hasilnya bersifat interaktif dengan penerapan dan pengembangan aspek yang bersifat metodologis. Dalam persoalan ketenagakerjaan diharapkan mampu melakukan analisis prospektif pembentukan peluang kerja dan usaha serta mengaitkannya (*link and match*) dengan pengembangan sektoral dan pasar kerja untuk pembangunan daerah maupun pasar kerja internasional.

Kajian ini menggunakan pendekatan sistem yang ditujukan untuk menghasilkan solusi strategis dan taktis dari persoalan krisis ketenagakerjaan yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan budaya mencakup juga perihal kependudukan dan kesejahteraan rakyat. Dalam melacak pengembangan protokol manajemen pengendalian pengangguran akibat Krisis'08 sebagai sistem akan digunakan prinsip pendekatan manajemen yang berbeda dengan pendekatan analisis dan penyelesaian masalah. Pendekatan yang akan digunakan lebih mengajak multi-pihak melalui FGD yang dilakukan dapat mengembangkan protokol mengikuti juga prinsip kajian bersama dalam satuan aksi yang diterjemahkan dari *Human Inquiry Approach*. Pendekatan dikemas dalam Teknik *Appreciative Inquiry* yang mengenal siklus 5-D yaitu *Definition, Discovery, Dream, Design and Destiny* (Cooperrider dan Whitney, 2001; der Haar dan Hosking, 2004), sehingga permasalahan krisis ketenagakerjaan bukanlah dinilai sebagai sebuah tumpuan awal dan akhir kegiatan.

Tumpuannya lebih pada *Definition* sebagai langkah awal kegiatan, yaitu langkah untuk memilih topik yang akan dieksplorasi dan menjadi arah perubahan sekaligus kenyataan akhir yang akan terwujud. Topik-topik ini perlu dikembangkan bersama dan mengajak multi-pihak. Setelah ada topik, maka langkah berikutnya adalah *Discovery* yang menjadi sarana untuk memberi tempat kepada multi-pihak mengungkap dan mengapresiasi berbagai pandangannya mengikuti topik dengan optimal. Langkah ketiga adalah *Dream*, yaitu memberi ruang berimajinasi tentang peluang bekerja dan berusaha yang ideal pada masa depan. Informasi pada tahap sebelumnya dijadikan pijakan untuk berspekulasi mengenai kemungkinan masa depan. Langkah selanjutnya yaitu *Design* yang bertujuan untuk menciptakan atau mendesain kebijakan ketenagakerjaan ideal, proses dan hubungan yang mendukung mimpi yang telah diartikulasikan pada tahap sebelumnya. Aktivitas utamanya adalah menciptakan gagasan yang provokatif secara kolaboratif. Langkah terakhir adalah *Destiny* yang menguatkan kapasitas dukungan untuk membangun harapan dan menciptakan proses belajar, menyesuaikan dan berimprovisasi. Menurut Cashways (1994), tahapan ini dapat

juga diletakkan sebagai proses yang saling memberdayakan semua pihak *stakeholders* untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai mimpi atau visi masa depan mengeluarkan diri dari krisis ketenagakerjaan.

KRISIAL DAN KETENAGAKERJAAN

Dampak Krisial'08 terhadap Sektor Ketenagakerjaan

Krisial'08 berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional. ILO memperkirakan imbas Krisial'08 akan menyebabkan pengangguran di Indonesia pada tahun 2009 bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau mengalami kenaikan sekitar 9%. Hal ini disebabkan adanya (PHK) dari beberapa sektor usaha. Sektor ekspor - impor yang dicatat telah melakukan PHK sebanyak 15.000 orang pada 2008 lalu, kembali akan melakukan PHK juga pada tahun 2009 ini. Diperkirakan juga sektor tekstil akan melakukan PHK terhadap sekitar 14.000 orang dan sektor furnitur dan kerajinan sebanyak 35.000 orang. Belum lagi, potensi PHK akan terjadi pada sektor tenaga kerja migran, misalnya Malaysia akan memecat 300.000 tenaga kerja migran yang tentunya akan mempengaruhi pasar tenaga kerja migran dari Indonesia. Belum lagi ancaman PHK juga terjadi di negara-negara lain yang menjadi negara tujuan tenaga kerja migran Indonesia lain, seperti Korea dan Taiwan. Para tenaga kerja migran ini diperkirakan akan pulang ke Indonesia dan menjadi penganggur di daerah asal. Hal yang tidak dapat dilupakan juga, dampak Krisial'08 diperkirakan mengancam sektor pertanian di pedesaan Indonesia, utamanya mereka yang mengusahakan komoditas pertanian berorientasi ekspor seperti kelapa sawit dan karet.

Semua gambaran skenario Krisial'08 tersebut menempatkan masyarakat dan pedesaan pada posisi sulit karena menerima imbas krisis dari berbagai sektor. Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor yang membuat kondisi ketenagakerjaan pedesaan menjadi rentan:

- Tenaga kerja pedesaan yang bekerja di sektor formal perkotaan rentan menjadi pengangguran bila tempat bekerjanya melakukan PHK karena dampak Krisial'08.
- Tenaga kerja pedesaan yang bekerja di beragam usaha pertanian pedesaan yang berorientasi ekspor akan mengalami kesulitan karena menurunnya permintaan ekspor atas hasil pertanian mereka.

- Tenaga kerja pedesaan yang menjadi buruh migran terancam untuk kehilangan pekerjaannya bila tempatnya bekerja melakukan PHK sebagai dampak Krisis'08.

Apabila kondisi ini terjadi, maka ada kemungkinan bahwa para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan ini akan kembali ke desa asal mereka dan menjadi penganggur karena dengan kondisi pedesaan yang mengandalkan perekonomiannya pada sektor pertanian maka tidak akan banyak tersedia lapangan pekerjaan. Kondisi inilah yang dapat mengantarkan pada krisis ketenagakerjaan di pedesaan.

Bagian ini membahas besaran dan dampak Krisis'08, khususnya dalam imbasnya terhadap sektor ketenagakerjaan di pedesaan. Lebih jauh lagi, dibahas juga bagaimana pola-pola adaptasi yang kemudian dilakukan oleh masyarakat pedesaan guna mengatasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Guna memahami permasalahan tersebut, kajian dilakukan di sejumlah daerah dengan karakteristik permasalahan ketenagakerjaan yang berbeda sehingga diharapkan dapat dirangkum temuan yang saling melengkapi satu sama lain. Adapun daerah dan karakteristik masalah ketenagakerjaannya adalah:

- Kabupaten Cianjur – Jawa Barat (kantong pengirim TKI terbesar di Jawa Barat).
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (kantong pengirim TKI yang juga cukup besar setiap tahunnya).
- Provinsi Kalimantan Barat (pedesaan penghasil kelapa sawit—komoditi pertanian berorientasi ekspor, juga merupakan daerah pengirim TKI).
- Provinsi Riau (pedesaan berbasis pertanian komoditi kelapa sawit dan karet).

Pembahasan terhadap karakteristik ketenagakerjaan di keempat lokasi ini difokuskan pada kawasan pedesaan untuk melihat besaran angkatan kerja menganggur serta pola-pola yang dikembangkan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Kajian kemudian dilengkapi pembahasan ketenagakerjaan di perkotaan dengan fokus pada pola-pola pembukaan lapangan kerja dan berusaha yang dilakukan masyarakat desa yang melakukan migrasi ke kota atau juga mereka yang sebelumnya telah bekerja di kota namun kehilangan pekerjaannya karena mengalami PHK. Guna mendapatkan gambaran tersebut, kajian diarahkan pada sektor informal PKL – Makanan di Kota Bogor – Jawa Barat.

Isu Ketenagakerjaan di Pedesaan Indonesia

Dari 70.318 desa di Indonesia (BPS, 2008) hampir 45,2% masuk dalam kategori desa tertinggal. Demikian juga dicatat bahwa 68,4% dari 42,4 juta penduduk miskin ada di perdesaan (BPS, 2007). Kondisi ini merupakan akibat dari rendahnya tingkat produktivitas masyarakat pedesaan. Seperti diungkap dalam Sakernas, (2005), angka pengangguran terbuka pada tahun tersebut telah mencapai 11,1 juta jiwa (10,45% dari penduduk Indonesia), dari angka tersebut sekitar 5,28 juta jiwa (8,44%) tinggal di perdesaan dan 5,82 juta jiwa (13,32%) sisanya berada di perkotaan. Sementara, angka setengah pengangguran yang mencapai 29,92 juta jiwa (28,16%) meletakkan porsi terbesar yang terdapat di perdesaan yaitu sejumlah 23 juta jiwa (36,76%), sementara perkotaan hanya mencapai 6,92 juta jiwa atau 15,83% (BPS, 2006).

Perekonomian pedesaan pada umumnya masing ditunjang oleh sektor pertanian dengan dua faktor pendukungnya yaitu ketersediaan lahan dan tenaga kerja. Persoalannya, pengembangan ekonomi pedesaan cenderung terpinggirkan dalam pembangunan nasional. Hal ini akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya. Lahan yang terbatas, seiring dengan peningkatan tenaga kerja akibat pertumbuhan penduduk dan pengembangan ekonomi yang tidak memihak penduduk di pedesaan telah membuat keterbatasan akses terhadap lahan. Pada akhirnya, jumlah lahan yang ada cenderung tidak dapat mencukupi kehidupan yang layak bagi penduduk di pedesaan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, pedesaan sebenarnya bukan hanya menghadapi persoalan pengangguran. Akan tetapi, mereka yang bekerja di pedesaan juga menghadapi persoalan ketersediaan imbalan yang layak ketika bekerja. Sebagaimana diketahui, tenaga kerja yang ada di pedesaan utamanya hanya mahir melakukan kegiatan produksi (*on-farm*) dengan skala usaha kecil, serta kegiatan ekonomi lain yang tidak mensyaratkan kemahiran khusus (dagang dan jasa) yang juga berskala kecil dan memberi imbalan rendah. Artinya, krisis ketenagakerjaan sebenarnya sudah, bahkan sedang terjadi di pedesaan, baik ketika terjadi Krisis'08 maupun tidak.

Hal yang perlu dicatat kemudian adalah bahwa ketika menghadapi Krismon'97/98, menurut Mubyarto (2000), penduduk pedesaan dapat bangkit lebih cepat dibanding "ekonomi pemerintah". Ditunjukkan bahwa ketika itu memang terjadi "tambahan" pengangguran sebanyak 3,7 juta orang. Namun, mereka berhasil membentuk lapangan kerja sendiri, baik kerja mandiri (dengan dibantu anggota keluarga atau berusaha sendiri dengan pekerja tetap), maupun menjadi pekerja bebas. Respon ini berkaitan dengan tingkat resistensi sosial masyarakat terhadap

perkembangan ekonomi, khususnya penduduk pedesaan. Hanya sayangnya, perilaku respon ekonomi masyarakat terhadap krisis yang terjadi seperti ini diacuhkan oleh kebanyakan perancang pembangunan yang menjadi penasehat para pengambil kebijakan. Mereka masih menyimpulkan bahwa satu cara mengatasi persoalan krisis ketenagakerjaan, khususnya pengangguran adalah dengan mengejar pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dunia usaha swasta.

Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Pemiskinan Pedesaan

Fakta yang tidak dapat dinafikan sampai saat ini adalah bahwa perkembangan pedesaan (masyarakat dan desa) masih dicirikan oleh kemiskinan dan ketidakberdayaan. Merujuk keadaan ini, tidak salah apabila disimpulkan bahwa pendekatan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama ini telah keliru, karena mengabaikan pedesaan. Gejala ini seakan-akan menguatkan pesan lama Kartohadikoesoemo (1953), yang secara heroik berbicara tentang desa dan mengingatkan agar dalam mempertemukan pandangan-pandangan pengelolaan sosial "barat" (pembangunan) dengan pengaturan sosial di desa memerlukan kehati-hatian. Menurutnya, tanpa landasan itu, maka perkembangan atau pengembangan pedesaan hanya akan dimasuki "angkara murka"—kesusahan. Akibatnya, proses tersebut meluaskan sebagian orang desa menjadi susah, sehingga melahirkan banyak orang yang suka menuntut, tetapi segan untuk memikul kewajiban dan ingkar akan tanggung-jawab.

Pembangunan mulai mendorong dinamika ketenagakerjaan pedesaan ketika "revolusi hijau" dilaksanakan, karena memasukkan teknologi penyediaan pangan/padi ke pedesaan melalui pengawalan sistem birokratis komando yang sentralistik. Dengan kata lain, meski tanpa ada rancangan khusus tentang peranan desa dalam pembangunan, namun dicatat bahwa sejak itu, bantuan pemerintah untuk pembangunan desa terus meningkat. Produksi padi di Jawa dan luar Jawa meningkat lebih dari tiga kali sepanjang periode 1968-1993. Kecenderungan peningkatan produksi ini juga diperlihatkan oleh berbagai produksi usaha tani pangan lain seperti jagung, ubi kayu dan kedelai (Bappenas, 1997). Proses ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ketenagakerjaan pedesaan.

Sepanjang periode ini pula dicatat bahwa pekerja sektor pertanian di pedesaan yang mendekati 65% pada tahun 1971 mengalami penurunan sampai 44% pada tahun 2002. Pada masa revolusi hijau ini diketahui juga beberapa hal mengenai masyarakat dan desa, seperti penerapan pola PIR yang berkaitan dengan

pertanian di berbagai sub-sektor produksinya, pengembangan koperasi dari “atas” melalui KUD, pengembangan desa-desa baru melalui transmigrasi yang berkaitan dengan redistribusi lahan dan pembangunan pertanian.

Pengelolaan pembangunan yang ada pada periode “revolusi hijau” (1970-1983) tersebut, lebih menekankan pada produksi (*production centered development*) dengan peran komando penyeragaman aktivitas dari pemerintah. Pendekatan pembangunan seperti itu dicatat telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang secara fluktuatif pernah mencapai 11,3% pada 1973 lalu sempat turun menjadi 2,2% pada 1982 dan mulai naik kembali 2,5% sejak 1985 sampai terus meningkat kembali pada periode 80-an sampai 1995 (Bappenas, 1997).

Pembangunan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi ini selanjutnya dilakukan cenderung bergantung pada pendanaan luar negeri. Bahkan, menurut Tjondronegoro (2007), prosesnya tidak dilandasi oleh model pembangunan Indonesia yang didasarkan pada pengelolaan kekayaan SDA dan pendayagunaan serta peningkatan mutu tenaga kerja yang banyak dan mandiri. Perkembangan sektor pertanian masih terus mengandalkan produksi bahan mentah dan tidak berhasil mengembangkan agroindustri yang mampu menghela pembangunan pedesaan. Bahkan, menurut Tambunan (2002), industrialisasi pedesaan tidak berjalan dengan semestinya. Ada kecenderungan proses tersebut seperti mengacuhkan pemikiran Djojohadikoesoemo (1954), yang menginginkan industrialisasi bertumpu pada hasil sektor pertanian agar pertanian dapat berkembang mandiri. Hal yang malahan terjadi adalah perkembangan ekonomi dicapai dengan menjual SDA seperti batu bara, minyak, gas bumi, pasir dan hasil laut serta hutan. Pengelolaan pembangunan ini rapuh karena tidak dilandasi oleh kekuatan sumberdaya yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi kemudian lebih banyak dicapai dengan mengandalkan pada eksploitasi SDA. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kemudian diikuti oleh kerusakan SDA dan lingkungan. Hal yang membawa dua sisi akibat terhadap masyarakat dan desa. Di satu sisi, tidak dapat dibantah bahwa masyarakat pedesaan menikmati penerangan listrik, pengembangan prasarana pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat pedesaan sebenarnya terjebak terabaikan dari proses pembangunan yang sebenarnya. Oleh karena pembangunan terus dikelola dengan cara mendorong masyarakat pedesaan untuk semakin mengenal pelapisan sosial dimana mereka yang kaya dan berkecukupan berbanding dengan mereka yang menjadi petani miskin dan buruh tani tak bertanah. Menurut Tjondronegoro (2007), hal yang pada dasarnya berkaitan dengan persoalan struktur agraria yaitu akibat

penguasaan lahan dan SDA lebih menguntungkan golongan menengah dan “atas” di desa, bahkan pengusaha dan pemodal dari perkotaan.

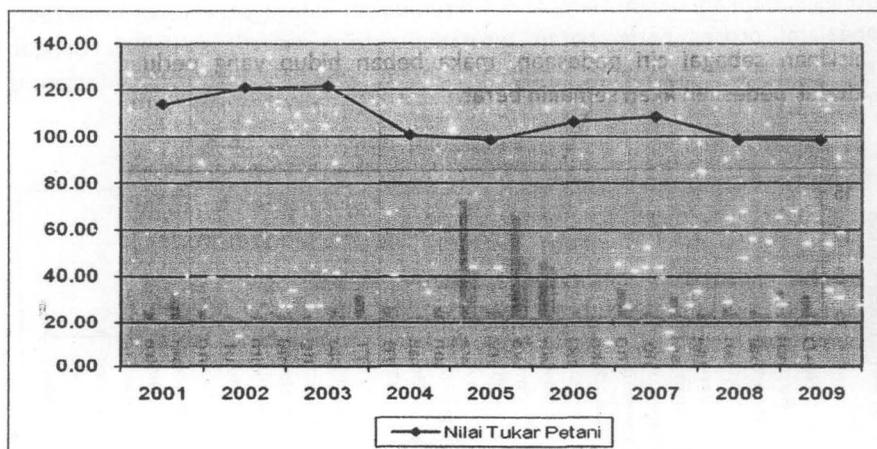
Dicatat bahwa perubahan struktur agraria dikaitkan dengan ketersediaan lahan pertanian sawah dan penyempitan penguasaan lahan oleh petani di pedesaan memang sangat mengkhawatirkan. Konversi lahan sawah di Indonesia pada periode 1963-1993 dicatat menurun tajam dari 31,6% menjadi 15,1%. Proses ini sangat nyata terjadi di Jawa dari 44,8% lahan sawah dari keseluruhan tanah yang digunakan menjadi 6,1% pada 1993. Perkembangan ini diikuti oleh penambahan rumahtangga yang menguasai lahan kurang dari 0,25 ha dari 18,8% dari seluruh rumahtangga petani menjadi 17,6% pada 1983, bahkan bertambah lagi ke 20,2% pada 2003. Selain itu, jumlah petani gurem/buruh tani juga meningkat dari 43,6% pada 1963 menjadi 48,6% pada 1993 (Sensus Pertanian, 1963-1983 dan Statistik Indonesia, 1994). Perkembangan ini menguatkan tesis klasik Soewardi (2009) yang menyatakan bahwa golongan petani dengan luasan lahan lebih dari 0,5 ha sajalah yang lebih dapat menerima teknologi baru dan meningkat produksinya. Perkembangan ini mengindikasikan juga komersialisasi melalui industri padat modal ke pertanian dan pedesaan hanya akan menambah jumlah petani gurem dan buruh tani serta menambah persoalan ketersediaan peluang kerja di pedesaan.

Gambar 5.1 memperlihatkan bahwa ada keragaman antar kawasan pedesaan dalam soal ketenagakerjaan. Selain itu, desa-desa di Jawa lebih banyak bergeser ke tipe desa “non-pertanian”. Gejala ini menguatkan berbagai studi sebelumnya, yang mengidentifikasi, bahwa petani di Jawa (jumlah petani terbesar) dalam mempertahankan kesejahteraannya sudah semakin bergantung kepada pendapatan yang berdasarkan kegiatan upahan. Menurut Kolopaking (2000), kondisi dan perkembangan yang demikian, mengingatkan pandangan Sajogyo—sosiolog kesejahteraan masyarakat dan desa, bahwa kemiskinan perlu terus diperhatikan karena akan terus ada walaupun pertumbuhan ekonomi mengesankan.

Pendekatan pembangunan yang ada tampaknya tidak sekaligus meniadakan kemiskinan secara tuntas. Kemiskinan bagaimanapun juga masih menjadi ciri pedesaan. Mengunggulkan produksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan desa ternyata memerlukan mekanisme kawalan dari masyarakat. Kebocoran akibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan optimalisasi pertumbuhan untuk kesejahteraan hanyalah impian. Ringkasnya, tanpa kawalan itu sebagaimana telah terjadi maka pembangunan hanya akan meminggirkan masyarakat dan desa.

Tesis klasik Tjondronegoro (1984), tentang pentingnya mengembangkan demokrasi di lingkungan komunitas (*dukuh*) di Jawa agar terbangun proses *check and balance* mengawal pembangunan menjadi relevan. Demokratisasi desa kemudian disuarakan juga oleh Mubyarto *et al.* (2004), sebagai bagian penting dalam perkembangan pedesaan pada dekade 90-an. Oleh karena dalam memasuki "tonggak reformasi" (tahun 1997 sampai sekarang), menurut Kartodirdjo (2001), pendekatan ekonomi perlu memberi tempat pada pendekatan budaya, politik dan sosial karena apabila tidak, maka prosesnya hanya akan mendorong kepada pemiskinan.

Perkembangan ekonomi desa yang dikalahkan dapat dilihat juga dari NTP---*Terms of Trade*, dimana pada periode 2001 sampai 2005, nilainya terus menurun. Ini artinya bahwa petani lebih banyak menanggung beban hidup, sehingga tingkat kesejahteraan cenderung menurun (Gambar 5.2). Meskipun NTP mulai membaik pada periode dua tahun sebelum terjadi Krisis'08, tetapi angkanya kembali menurun ke titik bawah setelah terjadi Krisis'08.



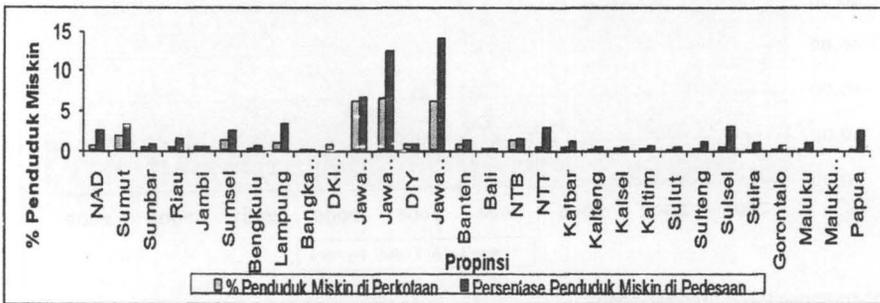
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009

Gambar 5.2. Perkembangan NTP, Desember 2001 - Januari 2009

Persoalannya kemudian adalah desentralisasi pembangunan melalui kebijakan pengembangan otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 yang ingin menggeser

paradigma manajemen pemerintah yang terpusat ke pengelolaan pembangunan yang dekat dengan kondisi masyarakat dan daerah belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Ada gejala, kebijakan otonomi daerah justru terjebak hanya memindahkan paradigma penyelenggaraan pemerintah terpusat ke daerah, yang tetap tidak memberi tempat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kebijakan desentralisasi pembangunan yang memberi otonomi kepada daerah dan telah memberikan cukup kewenangan (politik, keuangan dan pengelolaan SDA) kepada daerah, masih belum berimbas secara positif dan produktif ke perbaikan hidup masyarakat di akar rumput. Bahkan, sebagaimana perjalanan pembangunan sebelum era desentralisasi sampai sekarang, dicatat belum ada sebuah rancangan yang jelas dan pasti dalam memberi tempat pada pembangunan pedesaan.

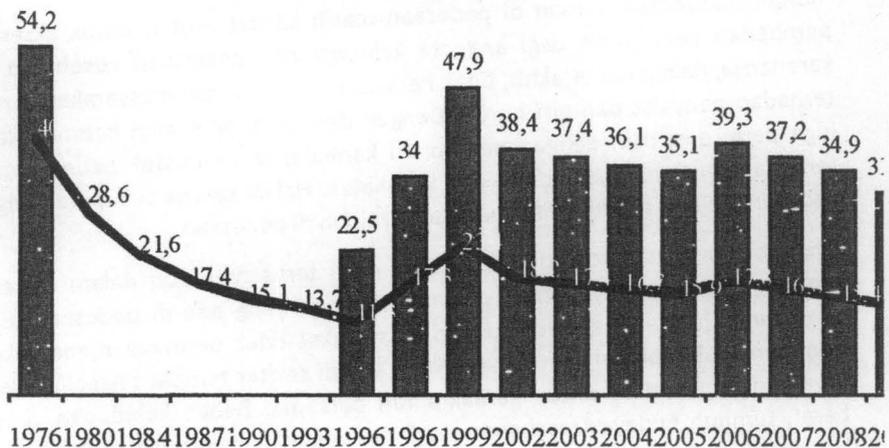
Dalam kondisi seperti itu diperkirakan ketenagakerjaan pedesaan akan terus menghadapi dinamika kemiskinan, bahkan proses pemiskinan akibat kekeliruan pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 5.3 bahwa kemiskinan yang menjadi ciri pedesaan itu memang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, dalam Gambar 5.4 ditunjukkan bahwa penurunan kemiskinan mengalami proses perlambatan terutama setelah terjadi Krisis'08. Dengan kemiskinan sebagai ciri pedesaan, maka beban hidup yang perlu ditanggung penduduk pedesaan akan semakin berat.



Sumber: Bappenas, 2009

Gambar 5.3. Perkembangan Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1976-2009

Dari berbagai diskusi kelompok yang dilakukan selama kajian, diidentifikasi berbagai hal yang sepatutnya diperhatikan dalam mengurangi beban penduduk pedesaan, khususnya menghadapi krisis ketenagakerjaan.



Sumber: Bappenas, 2009

Gambar 5.4. Penduduk Miskin Indonesia Menurut Provinsi 2006

Pertama, berkenaan dengan faktor warisan, persoalan mendasar yang mempengaruhi penyediaan peluang kerja di pedesaan yaitu ketimpangan kepemilikan dan atau akses pada penguasaan lahan produktif. Dengan akses terhadap faktor produksi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka sangat tidak realistis untuk dapat berharap bahwa petani sebagai penduduk pedesaan mampu berproduksi secara rasional apalagi kompetitif. Mengurai krisis ketenagakerjaan pedesaan mensyaratkan adanya kebijakan perbaikan struktur agraria yang disinergikan dengan upaya-upaya peningkatan produktivitas pengelolaan lahan dan sumber alam produktif masyarakat desa. Selain itu, perlu ada kawalan terhadap pelaksanaan UU Penanaman Modal tahun 2007 yang memberikan perlakuan bagi semua penanam modal hak “istimewa”, dimana UU ini dapat membuat mereka yang bermodal besar untuk ikut masuk ke sektor pertanian di pedesaan. Kawalannya adalah berupa membuat mekanisme pengaturan pelibatan masyarakat dan desa, oleh karena tanpa adanya pengawalan, maka pelaksanaan UU tersebut dapat lebih mendorong terjadinya pemiskinan pedesaan.

Kedua, penanganan krisis ketenagakerjaan pedesaan perlu dikaitkan dengan penyediaan peluang kerja atau usaha dalam rangka perbaikan atau pembangunan infrastruktur dasar baik fisik maupun infrastruktur sosial ekonomi (pemberian akses kepada modal, pendampingan usaha maupun pasaran produk). Sebuah proses yang berkaitan dengan upaya peningkatan dan perluasan kewirausahaan.

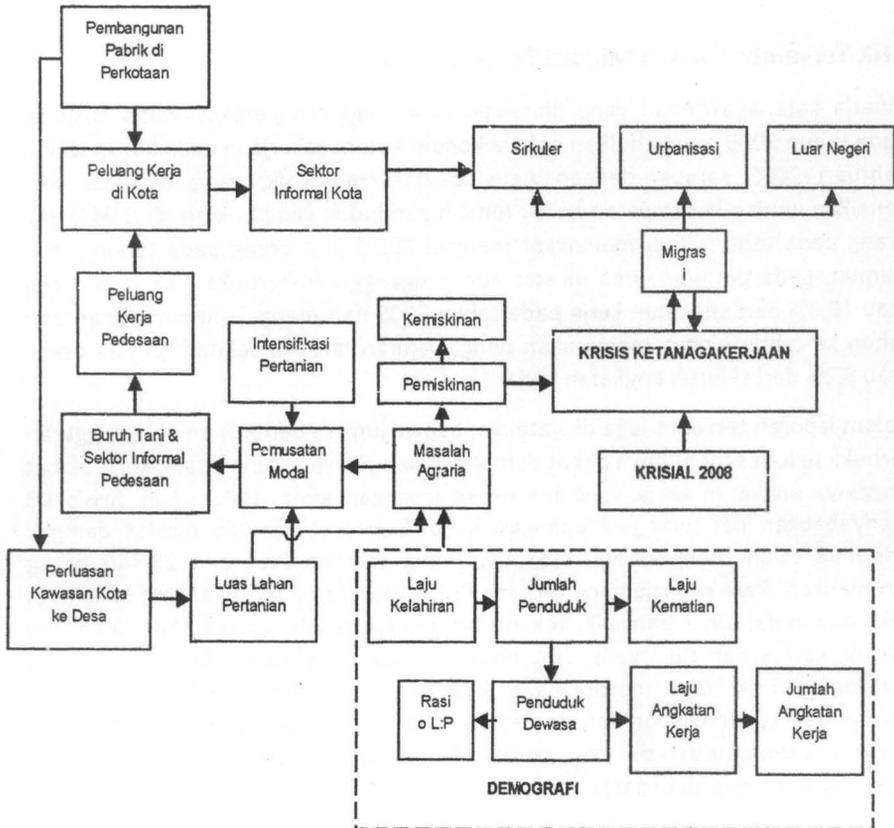
Ketiga, masyarakat miskin di pedesaan masih sangat rentan untuk akses pada pemberian pendidikan bagi anggota keluarga dan pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, dalam hal terakhir, tidak heran apabila golongan masyarakat ini rentan terhadap penyakit dan gizi buruk. Dengan demikian, persoalan ketenagakerjaan juga perlu dikaitkan dengan pemberian kemudahan penduduk pedesaan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena cukup berpengaruh pada kinerja dan produktivitas penduduk miskin di pedesaan.

Keempat, kapasitas kolektif masyarakat desa terus menurun dalam merespon tantangan dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di pedesaan. Gejala yang tumbuh adalah kecenderungan masyarakat tidak berminat menemukani dan mengelola potensi sumberdaya yang ada di sekitar tempat tinggalnya secara kreatif dan produktif untuk kemakmuran bersama. Beban kehidupan semakin berat, tumbuh budaya "masing-masing" cari selamat. Belum lagi, ada juga bukti bahwa perbaikan hidup yang nyata malah justru datang dari remitan yang dialihkan dari mereka yang bekerja ke luar desa, seperti ke kota atau ke luar negeri menjadi buruh migran. Dalam diskusi, disebutkan bahwa krisis ketenagakerjaan perlu diatasi sendiri oleh masyarakat pedesaan dengan mencari peluang kerja dan usaha yang mampu memberi imbalan yang layak. Oleh karena, sampai saat ini rancangan pembangunan dari pemerintah tidak memberi hasil yang nyata.

Kelima, mengatasi krisis ketenagakerjaan pedesaan disebutkan berkaitan dengan peranan pemerintah daerah. Hal yang disebut oleh peserta diskusi adalah pentingnya peningkatan peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi keterlibatan pemerintah desa, BPD dan partisipasi masyarakat secara seimbang. Pemerintahan daerah selama ini dinilai masih belum mampu mengembangkan mekanisme birokrasi pemerintahan berkewirausahaan (*entrepreneurial*) yang baik dan bersih serta dapat menggerakkan masyarakat pedesaan di daerah untuk mendayagunakan potensi yang ada secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Keenam, pengembangan usaha yang berkaitan dengan persoalan kerusakan lingkungan dan degradasi SDA yang diakibatkan oleh pengelolaan sumberdaya lingkungan yang keliru. Ancaman terhadap lingkungan hidup dan konservasi SDA bahkan semakin transparan dan agresif. Hal ini terjadi akibat kesulitan yang dialami masyarakat dalam memperoleh lahan produktif, sehingga penduduk desa "terpaksa" masuk merambah kawasan hutan lindung. Semua itu sering dipicu oleh penyimpangan pelaku ekonomi kuat, misalnya pemegang konsesi HPH atau HTI dalam kasus *illegal logging*, kerusakan akibat beroperasinya perusahaan tambang, pencemaran di kawasan industri atau pengusahaan tambak di kawasan pesisir yang tidak berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar industri,

kawasan tambang dan pabrik, banyak yang mengalami nasib tidak menguntungkan. Di satu sisi, keberadaan industri pabrik dan tambang secara umum belum memberi manfaat signifikan bagi perbaikan taraf kehidupan masyarakat. Di sisi lain, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya berdampak sangat buruk bagi kehidupan dan kesehatan penduduk sekitar. Dalam kondisi yang demikian, masyarakat sering tidak berdaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang hilang, termasuk hak untuk hidup yang nyaman tanpa tercemar oleh limbah industri, atau memperjuangkan hak-hak mereka yang hancur akibat ditimpa bencana dari salah kelola lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab.



Gambar 5.5. Krisis Keuangan Global dan Dampaknya terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia

Ketujuh, berkaitan dengan penguatan manajemen pembangunan dari pemerintah desa sendiri agar dapat memberi tempat pada pengembangan peluang usaha dan bekerja masyarakat. Pendekatan pembangunan birokratik dan sentralistik yang diterapkan lebih dari tiga dasawarsa (hingga akhir tahun 1997) tidak hanya telah membuat masyarakat desa menjadi sangat tergantung pada pihak luar, akan tetapi juga melemahkan desa sebagai institusi dan sistem komunitarian yang otonom. Bahkan, proses tersebut telah memporak-porandakan instusi sosial desa yang mampu menyelesaikan persoalan, khususnya masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan seri FGD yang dilakukan, dirumuskan keterkaitan antara Krisial'08 dan dampaknya terhadap kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Gambar 5.5.

PHK Tersembunyi dan Migrasi Tenaga Kerja

Kinerja ketenagakerjaan yang diuraikan dalam laporan perekonomian nasional pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kondisi ketenagakerjaan pada kurun waktu Februari 2005 sampai dengan Agustus 2007 membaik, yang ditandai oleh kenaikan jumlah kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja dari 94,9 juta orang pada tahun 2005 meningkat menjadi 102,5 juta orang pada tahun 2009. Namun, pada periode sama dicatat ada pengangguran terbuka 10,8 juta orang atau 10,3% dari angkatan kerja pada tahun 2005 dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menyisakan pengangguran terbuka sekitar 9,3 juta orang atau 8,2% dari seluruh angkatan kerja.

Dalam laporan tersebut juga dinyatakan, bahwa jumlah penurunan pengangguran terbuka belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh penyediaan peluang kerja akibat tingginya angkatan kerja yang masuk ke lapangan kerja. Belum lagi, Krisial'08 menyebabkan pengurangan lapangan kerja. Sampai Juni 2009 dicatat dampak Krisial'08 telah mengakibatkan 53.388 orang terkena PHK dan 23.440 orang dirumahkan. Para pekerja yang terkena PHK ini terutama mereka yang bekerja di sektor manufaktur, elektronik, tekstil dan produk tekstil, sepatu, kerajinan dan plastik, kertas dan pulp yang umumnya berorientasi ekspor. Alasan pengusaha melakukan PHK dan merumahkan pekerja antara lain, akibat penurunan permintaan pasar ekspor dan domestik, krisis bahan baku yang diimpor, tidak mampu berkompetisi dengan produk impor yang sejenis dihasilkan tetapi harganya lebih murah di pasar domestik.

Dampak Krisial'08 terhadap PHK tenaga kerja dalam periode 2008-2009 berlangsung bertahap mengenai berbagai daerah tempat lokasi perusahaan.

Misalnya di kawasan industri Tangerang, Bekasi, Karawang dan Sukabumi di Jawa Barat. Juga di kawasan industri Kota Semarang di Jawa Tengah dan kawasan industri Surabaya dan Sidoarjo di Jawa Timur. Daerah yang juga merasakan dampak Krisial'08 di luar Jawa utamanya yang ada di Sumatera (seperti di Provinsi Riau dan Sumatera Utara) serta di Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur).

Dalam mengendalikan dampak Krisial'08, pemerintah cenderung melakukan pencegahan PHK. Satu kebijakan yang berkaitan dengan hal itu adalah dikeluarkannya Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri (Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dalam Negeri, Perindustrian dan Perdagangan) tentang pemeliharaan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global. Kebijakan ini dinilai efektif karena dapat menurunkan jumlah pengangguran sekitar 500.000 orang. Lihat kembali Tabel 5.2 tentang perkembangan jumlah pengangguran terbuka pada periode antara Februari 2005 sampai Februari 2009.

Tabel 5.2. Perbandingan Angkatan Kerja, Pekerja dan Pengangguran Terbuka Februari 2005-Februari 2009

Tahun	Angkatan Kerja (juta orang)	Pekerja (juta orang)	Pengangguran Terbuka (juta orang)	TPT (%)
Februari 2005	105,80	94,95	10,85	10,26
November 2005	105,86	93,96	11,90	11,24
Februari 2006	106,28	95,18	11,10	10,45
Agustus 2006	106,39	95,46	10,93	10,28
Februari 2007	108,13	97,58	10,55	9,75
Agustus 2007	109,94	99,93	10,01	9,11
Februari 2008	111,47	102,04	9,42	8,46
Agustus 2008	111,94	102,55	9,39	8,39
Februari 2009	113,74	104,49	9,26	8,14

Sumber: Dimodifikasi dari Djaja *et al.*

Persoalannya adalah, dari kajian lapangan diketahui bahwa PHK juga terjadi di kalangan petani perkebunan rakyat dan buruhnya yang bekerja di sektor ekonomi pedesaan yang juga terkena dampak negatif Krisial'08, seperti pekebun-pekebun sawit, karet dan coklat di Sumatera dan Kalimantan yang terpaksa menghentikan

kegiatan usaha akibat jatuhnya harga jual produk mereka¹. Dengan jatuhnya harga produk pertanian yang mereka hasilkan, maka mereka menghentikan kegiatan dan bahkan tidak menarik buruh kerja. Mereka ini yang dapat disebut sebagai korban Krisial'08 dengan status "PHK Tersembunyi".

Krisial'08 yang terjadi, dengan demikian dapat disimpulkan menambah tingkat krisis ketenagakerjaan pedesaan. Kondisi yang pada gilirannya menambah beban kehidupan. Lebih lagi, akibat berkurangnya peluang kerja yang menurunkan kemampuan masyarakat pedesaan memperoleh penghasilan, ternyata diikuti oleh peningkatan harga bahan-bahan pokok. Lihat kembali Gambar 5.2 yang memperlihatkan penurunan NTP pada periode Krisial'08 (antara Oktober 2008 sampai Juli 2009).

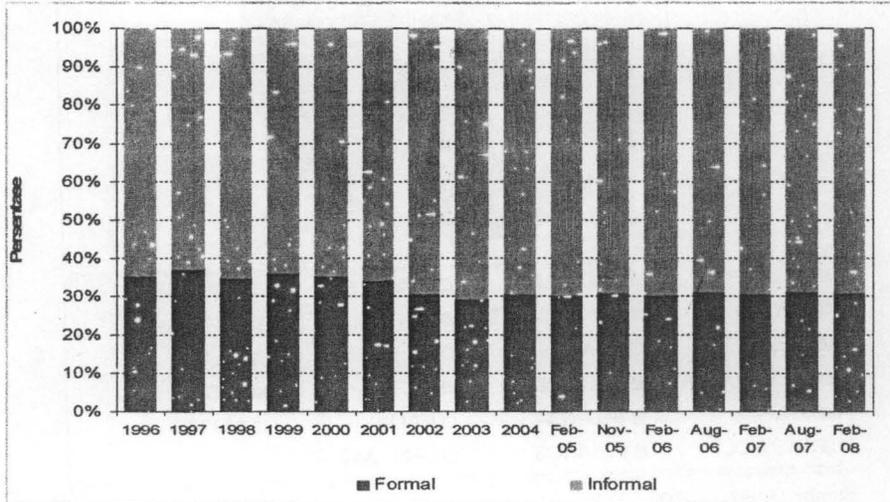
Tingkat resistensi sosial masyarakat pedesaan cukup tinggi dalam menyikapi kekurangan peluang kerja yang memberi imbalan pendapatan yang layak. Salah satu respon dari angkatan kerja pedesaan adalah dengan melakukan migrasi mencari kerja untuk mendapatkan pendapatan yang cukup. Prosesnya mulai dari melakukan migrasi sirkuler desa - kota, urbanisasi sampai mencari kerja sebagai buruh migran ke luar negeri. Mereka ini juga banyak membentuk usaha-usaha di sektor informal di perkotaan.

Berbagai studi tentang migrasi, khususnya urbanisasi menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat, baik pada tingkat regional maupun nasional. Misalnya, pada tahun 1971, 1980, 1990, 1995, dan 2000 diketahui tingkat urbanisasi di Jawa Barat berkembang dari 12,42%, 21,02%, 34,51%, 42,69% dan 50,31%. Demikian juga pada periode yang sama di tingkat nasional, terjadi peningkatan dari 17,42%, 22,29%, 30,94%, 35,90% dan 49,99% (Nugraha, 1998; Bambang dan Ali, 2002).

Pada masa Krismon'97/98, usaha-usaha sektor informal menjadi *safety valve* masyarakat untuk bertahan hidup menahan badai ekonomi yang mengenainya. Usaha-usaha informal ini umumnya bersifat usaha mandiri dengan skala usaha kecil sampai menengah. Di pedesaan, selain usaha di sektor pertanian cenderung berkembang juga usaha yang bergerak di sektor "jasa dan dagang". Sedangkan di perkotaan, polanya cenderung dalam bentuk usaha "jasa dan dagang". Resistensi sosial menghadapi badai Krisial'08 juga diduga adalah dampak kehadiran sektor

¹ Harga CPO Cif Rotterdam yang pada Juli 2008 bernilai USD 1.200/ton menjadi USD 700/ton pada minggu kedua Oktober 2008. Harga karet yang pada akhir Juni 2008 mencapai USD 3,3/kg turun menjadi USD 2.2/kg pada Oktober 2008. Akibatnya, harga TBS Sawit hanya Rp. 600,- sampai Rp. 700,- saja, yang sebelumnya harga TBS sampai tiga atau empat kali lipat, demikian juga harga bahan olah karet turun hanya sekitar Rp. 6.000,-/kg.

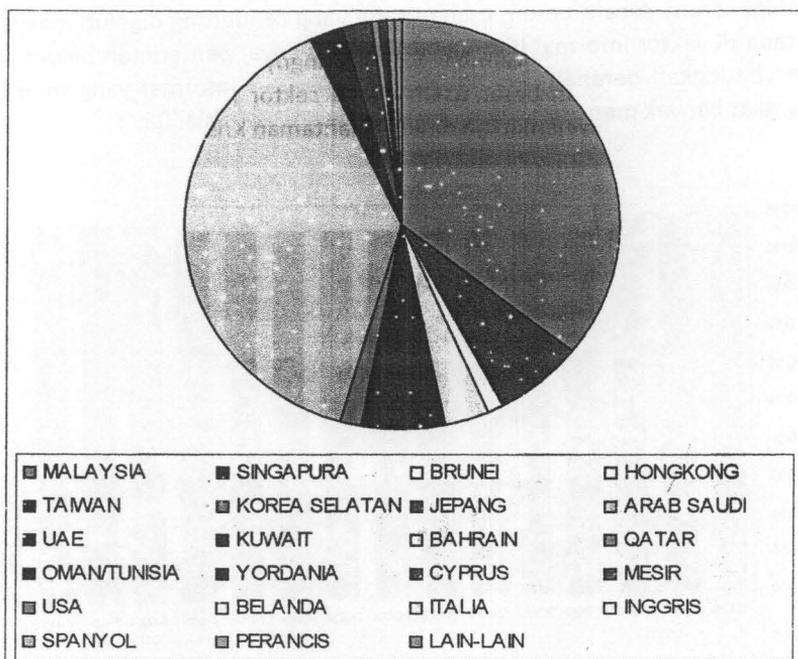
ini. Hal ini karena secara umum usaha-usaha yang cenderung digeluti masyarakat ini berada di sektor informal (Gambar 5.6). Sayangnya, pemerintah belum terlalu memperhitungkan peranan besar usaha-usaha sektor informal yang membantu masyarakat banyak menyelamatkan diri dari hantaman Krisis'08.



Sumber: Bappenas, 2009

Gambar 5.6. Perkembangan Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, 1996 sampai Februari 2008

Dalam menemukan atau membuka peluang kerja, angkatan kerja pedesaan terpaksa harus melakukannya dengan migrasi oleh karena pembangunan yang dilaksanakan di dalam negeri cenderung meminggirkan pedesaan. Pembukaan lapangan kerja dengan migrasi ini sampai mendorong mereka bekerja di luar negeri. Angkatan kerja pedesaan telah menginternasional karena bekerja hampir di seluruh dunia. Hanya saja, karena tawaran kerja yang ada dari negara tujuan bekerja kebanyakan adalah sebagai penatalaksana rumahtangga (yang termasuk juga peluang kerja sektor informal), maka prosesnya cenderung mengisi sektor ini dengan lebih banyak melibatkan perempuan. Tercatat pada tahun 2009 saja, bahwa jumlah tenaga kerja perempuan kita yang mengisi pekerjaan sektor informal di luar negeri mencapai 74% dari total tenaga kerja Indonesia di luar negeri.



Sumber: BNP2TKI, 2009

Gambar 5.7. Sebaran TKI Berdasarkan Negara Lokasi Tujuan Bekerja Tahun 2008

Kondisi ketenagakerjaan pedesaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah menjadikan pemerintah menyiapkan tiga kebijakan strategis untuk menghadapi guncangan ekonomi yang mengikuti Krisial'08. *Pertama*, membentuk lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Untuk itu, maka penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih diarahkan pada penempatan tenaga terampil yang bekerja di sektor formal. *Kedua*, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih bekerja informal.

Selain itu, melakukan tindakan untuk mengurangi beban masyarakat melalui program stimulus fiskal. Program ini dipandang akan efektif apabila disalurkan untuk menopang pengembangan pertanian dan UMKM. Selain itu, untuk membiayai program padat karya dalam rangka meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas sosial ekonomi pedesaan secara terukur agar

meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di sektor agroindustri. Dengan dasar, pembiayaan mikro khusus perlu dilaksanakan dalam hal ini (Siregar dan Masyitho, 2009).

Dampak Krisial'08 yang berbeda dibanding dengan Krismon'97/98 memang membuat pemerintah menetapkan kebijakan yang sedikit berbeda. Selain menyiapkan dana untuk mengendalikan dampak Krisial'08 untuk penyelamatan sektor finansial, juga menyiapkan kebijakan menggerakkan sektor riil melalui Kebijakan Stimulus Fiskal. Hal ini terutama untuk perluasan peluang kerja dan penambahan wirausaha baru.

Dari kajian indikator dan metodologi tentang krisis keuangan diketahui tidak ada yang dapat mendeteksi akan datangnya krisis (Eriyatno *et al.*, 2009). Oleh karena itu, yang penting di dalam menyiapkan pengendalian dampak guncangan ekonomi akibat krisis terhadap ketenagakerjaan adalah menyiapkan sistem pengendaliannya.

Penurunan Tingkat Resiliensi Sosial

Di satu sisi, masyarakat memang memiliki tingkat resistensi yang tinggi. Kemampuan mereka untuk bertahan dalam kondisi perekonomian yang sulit serta mengupayakan pencarian jalan keluar melalui beragam mekanisme rekayasa ketenagakerjaan dapat dilihat pada konteks Krismon'97/98 serta sekali lagi pada Krisial'08. Namun, masyarakat khususnya mereka yang tinggal di pedesaan dan sektor marjinal perkotaan, memiliki tingkat resiliensi yang cenderung semakin menurun. Hal itu dapat dilihat dari semakin mudahnya isu perekonomian berdampak pada timbulnya kekacauan sosial. Diduga hal ini disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pemerintahan desa. Oleh karenanya, menyikapi penurunan resiliensi ini perlu dilakukan dengan mengembangkan mekanisme kawalan dari masyarakat dalam persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya sudah disinggung tentang pandangan Tjondronegoro (1984) tentang pentingnya mengembangkan demokrasi di lingkungan komunitas (*dukuh*) di Jawa agar ada proses *check and balance* mengawal pembangunan menjadi relevan. Kemudian juga pendapat mengenai pentingnya demokratisasi menurut sebagai bagian penting dalam perkembangan pedesaan (Mubyarto *et al.*, 1990).

Oleh karenanya, Kartodirdjo (2001) berpendapat bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas resiliensi masyarakat, maka pendekatan ekonomi yang dilakukan perlu memberi ruang bagi pendekatan budaya, politik dan sosial. Apabila tidak, maka

prosesnya tidak akan membawa kesejahteraan pada masyarakat. Menggunakan teknik AHP untuk menganalisis pendapat pihak-pihak yang relevan, kajian ini mendapati bahwa faktor utama penyebab penurunan kapasitas resiliensi masyarakat adalah rendahnya proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat luas dalam berbagai upaya pembangunan pada setiap tahapannya (mulai tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan monitoring serta evaluasi pencapaian). Rendahnya mutu pelaksanaan proses demokrasi dan partisipasi tersebut menyuburkan berbagai praktek tata kelola pemerintahan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, seperti korupsi dan ketidakbersambungan program pemerintahan antara pusat dan daerah.

Oleh karenanya, maka strategi penguatan yang dapat ditempuh adalah demokratisasi pemerintah daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Proses pembangunannya sendiri berfokus terutama pada dua tahapan yaitu penyelamatan dan pemulihan. Proses penyelamatan dititik-beratkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pengangguran, termasuk di dalamnya beragam program jaring pengaman sosial yang selama ini sudah dilakukan. Sedangkan lebih lanjut lagi, proses pemulihan dititik-beratkan pada aspek keberlanjutan dan kesinambungan. Pada bagian ini, hal yang menjadi fokus adalah upaya-upaya pembukaan lapangan kerja secara massal bagi warga masyarakat yang masih menganggur. Catatan utama dari penerapan kedua pendekatan tersebut (penyelamatan dan pemulihan) adalah bahwa upayanya perlu dilaksanakan dengan memperhatikan besaran dan dampak krisis ketenagakerjaan yang muncul berbeda-beda di setiap daerah. Dengan kata lain, kurang tepat jika dilakukan pola yang seragam secara nasional dalam pengelolaan atas dampak krisis.

Pihak yang dianggap dapat berperan dominan dalam upaya penguatan kapasitas resiliensi masyarakat ini adalah pemerintah daerah. Hal tersebut diketahui memiliki alasan karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membangun dasar pengaturan formal bagi dijalankannya strategi seperti tersebut di atas. Pengaturan formal tersebut dipandang menjadi titik awal yang mutlak diperlukan bagi upaya ini. Pada gilirannya kemudian, barulah peran-peran pihak yang lain juga menjadi penting, dalam hal ini termasuk pelaku dunia usaha, NGO, perguruan tinggi, petani dan buruh tani serta golongan masyarakat miskin.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia sudah berada dalam kondisi krisis bahkan sebelum terjadinya Krisis'08. Hal ini terutama terjadi di pedesaan yang justru memiliki lebih banyak angkatan kerja dibanding kawasan perkotaan. Kondisi ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang dianut oleh pemerintah, khususnya sepanjang era orde baru yang lebih mengedepankan pertumbuhan

dibandingkan pemerataan sehingga timbul pola-pola pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat—khususnya di pedesaan dan pertanian sebagai corak utama perekonomian Indonesia. Pembangunan dilakukan bukan dengan memperkuat sistem industri berbasis pertanian melainkan lebih mengandalkan eksploitasi SDA dan penerapan teknologi. Sayangnya, tanpa pengawalan dan perlindungan dari aspek legal formal, maka proses yang ada justru mendorong masuknya kapital ke pedesaan dalam jumlah besar yang pada gilirannya telah meminggirkan masyarakat desa dari pembangunan di daerahnya sendiri sebagai akibat dari penguasaan lahan mereka yang semakin lama semakin sempit. Sebuah proses pembangunan yang sayangnya tidak diikuti oleh demokratisasi peran masyarakat dan desa. Dari sini, masyarakat desa kemudian menciptakan sendiri peluang bekerja mereka, utamanya melalui proses migrasi bekerja ke luar daerah mereka yang tidak hanya saja berhenti sampai di kawasan perkotaan Indonesia, tapi juga lebih jauh telah mendunia ke berbagai negara. Krisis'08 oleh karenanya dapat memperberat beban masyarakat dan desa karena dikhawatirkan dampak krisis yang melanda negara-negara tempat tujuan bekerja dan pabrik-pabrik di perkotaan Indonesia yang berorientasi komoditi ekspor telah mendorong PHK besar-besaran. Hal ini akan "mencetak" banyak sekali pengangguran yang bila mereka kembali ke desa asal mereka maka desa tidak akan mampu memberikan peluang kerja yang cukup.

Masyarakat pada umumnya memiliki tingkat resistensi yang tinggi terhadap kondisi krisis yang berimbas kepada kondisi ketenagakerjaan. Namun rendahnya nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dipandang melemahkan kapasitas resiliensi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah demokratisasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan yang mencakup dua aspek yaitu penyelamatan bagi kebutuhan dasar masyarakat dan pemulihan bagi keberlanjutan ketenagakerjaan masyarakat dengan mempertimbangkan besaran dan dampak krisis yang dirasakan pada setiap daerah. Pelaku yang dapat menjadi penggerak dalam hal ini adalah pemerintah daerah didukung oleh pihak-pihak pelaku dunia usaha, NGO, perguruan tinggi, petani dan buruh tani serta golongan masyarakat miskin.

PENGENDALIAN PENGANGGURAN AKIBAT KRISIAL'08: UPAYA PENGEMBANGAN PROTOKOL

Bertambahnya pengangguran merupakan dampak yang paling terasa dari Krisis'08. Untuk itu, perlu upaya pembentukan lapangan kerja produktif untuk mengatasinya dengan pilihan sasaran yang tepat. Tepat sasaran geografis meliputi

wilayah-wilayah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang parah terutama sektor industri dan jasa (kawasan perkotaan), pertanian pangan dan perkebunan rakyat (kawasan pedesaan) dengan sasaran kegiatan diusahakan dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan mampu memelihara tingkat pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kegiatannya pun perlu tepat melakukan sinergi dengan sasaran penduduk miskin yang terpuruk akibat Krisial'08.

Hasil kajian yang dilakukan dan akan diuraikan selanjutnya merupakan naskah dasar untuk perumusan protokol manajemen dampak Krisial'08 terhadap ketenagakerjaan. Khususnya untuk mengendalikan dampak Krisial'08 yang mendorong penambahan pengangguran, sehingga memperberat krisis ketenagakerjaan yang ada dan mempercepat proses pemiskinan. Dari seri diskusi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perumusan protokol manajemen dampak Krisial'08 sangat tergantung dengan tata pikir para analis dan kemauan politis para pengambil kebijakan. Sampai saat ini disimpulkan pendekatan manajemen krisis yang digunakan pemerintah adalah formula stabilisasi untuk menjamin keberlanjutan fiskal. Namun demikian, selain penyelamatan fiskal maka hal yang dipandang perlu adalah mendorong aktivitas sektor riil. Bahasan selanjutnya merupakan rumusan naskah akademis hasil dari kegiatan kajian yang dilakukan untuk menelusuri kebijakan publik yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi dampak Krisial'08. Fokusnya kepada pengendalian krisis ketenagakerjaan, terutama mengendalikan pengangguran akibat PHK ataupun PHK Tersembunyi yang terjadi di pedesaan dan sektor-sektor usaha non-formal.

Dasar Pemikiran dan Prinsip

Pengembangan lapangan kerja produktif berbasis masyarakat adalah pengendalian pengangguran akibat Krisial'08 dari pemerintah dan dilaksanakan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan yang mengutamakan menggerakkan sektor riil melalui penerapan prinsip-prinsip:

- Berpihak terhadap golongan miskin.
- Mempertimbangkan keanekaragaman ruang dan aktivitas.
- Memperhatikan keterkaitan ekologis.
- Mengutamakan pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang adaptif dengan kondisi daerah.

- Bekerja sinergis.
- Mendorong partisipasi.
- Dikembangkan dalam sistem yang holistik.

Pemikiran yang dijadikan dasar dan menjadi landasan prinsip pengendalian pengangguran akibat Krisis'08 hakekatnya adalah pengendalian krisis dengan menggerakkan sektor riil. Dengan cara pandang ini diharapkan menjadi pemikiran tambahan dari pendekatan manajemen krisis yang bertumpu pada formula stabilisasi untuk menjamin keberlanjutan fiskal. Selain itu, penggunaan konsep pemberdayaan daerah dan konsep berbasis masyarakat untuk memperlihatkan pentingnya pada era demokratisasi seperti sekarang ini menggerakkan sektor riil perlu secara sinergi dengan upaya saling memberdayakan antar pihak yang berkepentingan. Sektor riil dikembangkan dalam rangka pembentukan peluang kerja produktif yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang *entrepreneurial* dan berpihak kepada ekonomi rakyat (*pro poor*), mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan ekonomi rakyat dan adaptif dengan kondisi ekologi di dalam satuan kawasan.

Diskusi-diskusi multi-pihak yang diadakan menunjukkan agar pengembangan peluang kerja produktif dilakukan oleh kegiatan perencanaan, penataan dan pemanfaatan ruang dalam satuan kawasan yang dikembangkan dengan beberapa asas, seperti: (a) Mempertahankan ruang fisik yang mengutamakan keseimbangan dan lingkungan serta yang mendorong perkembangan desa atau kota yang dinamis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien; (b) Menciptakan ketertiban, ketenteraman, keindahan dan keserasian perkembangan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah yang menjadi akar ketahanan dan kohesi sosial budaya masyarakat; (c) Mengutamakan pendekatan pembangunan *bottom-up* dalam memanfaatkan ruang sesuai fungsi kawasan yang memperkuat arah kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dan kebijakan umum pemerintah provinsi dan kabupaten dan (d) Menjalinkan kerjasama antar pihak di berbagai tingkatan (desa, antar desa, kota dan antar kota) dalam kerangka membangun keterkaitan ekologis secara kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya yang ada.

Hal lain yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan protokol pembentukan peluang kerja produktif ini adalah kelembagaan tata kelolanya yang saling memberdayakan. Program dan kegiatan dibentuk dalam kerangka membentuk ruang dialog multi-pihak bagi sebuah hubungan yang sinergis dan produktif

(pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai motor penggerak dan lembaga masyarakat lainnya, seperti NGO, swasta sebagai mitra) untuk ikut dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di kawasan perdesaan. Ruang dialog multi-pihak itu kemudian dijadikan sarana untuk penyalarsan pemanfaatan ruang, hak-hak adat masyarakat perdesaan dan lingkungan serta konservasi SDA.

Selain itu, ruang dialog multi-pihak dapat menjadi unsur dalam pengembangan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang memfokuskan pada upaya penguatan akses anggota masyarakat dan komunitas pada pelayanan sosial dalam kerangka penyelamatan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, kesehatan dan perumahan). Ruang dialog multi-pihak itu juga dijadikan sarana untuk mengembangkan program dan kegiatan pemulihan dari Krisial'08 dengan memberi ruang fasilitasi donor, perusahaan swasta untuk ikut mengambil bagian dalam pengembangan peluang kerja produktif yang berkaitan dengan penerapan kebijakan CSR untuk peduli terhadap pemberdayaan masyarakat yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi SDA.

Tujuan, Ruang Lingkup dan Program

Bantuan Program Pemberdayaan Daerah Dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat bertujuan untuk membangun resiliensi dan memelihara stabilitas sistem perekonomian dan mencegah proses pemiskinan di dalam pembangunan berkelanjutan melalui upaya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*) dari krisis.

Pengertian resiliensi merujuk pada daya tahan terhadap perubahan-perubahan yang mendadak dan sulit diprediksi akibat dari lemahnya infrastruktur, transportasi dan rigiditas birokrasi dari mereka yang terpinggirkan dari proses pembangunan. Dengan demikian, pembentukan kesempatan kerja produktif akan menjadi saran pemulihan dari dampak Krisial'08, dengan harapan menyelamatkan dari penambahan beban pada kondisi krisis ketenagakerjaan dan menjadi media penguat landasan pembentukan peluang kerja yang menguatkan sendi ekonomi yang rapuh.

Kajian melalui forum FGD kemudian menemukan sejumlah ruang lingkup yang penting ditentukan. Ruang lingkup Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat paling tidak meliputi pendampingan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan dampak krisis melalui

pembentukan peluang kerja dan usaha produktif yang merupakan program jangka pendek dalam situasi turbulensi sosial yang dapat mengarah pemiskinan dan menggagalkan pembangunan serta mendorong disintegrasi negara.

Ada dua kegiatan yang dikembangkan dalam hal ini yaitu melakukan aksi penyelamatan dan melakukan aksi-aksi atau program pemulihan untuk membentuk peluang kerja produktif yang hilang terkena dampak Krisial'08.

Ruang lingkup program dan kegiatan atau aksi penyelamatan krisis meliputi tindakan darurat untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di pedesaan/kelurahan dalam satuan kawasan atau wilayah kecamatan yang berjumlah penduduk dan pengangguran banyak. Minimal ada dua kegiatan dalam hal ini, yaitu:

1. Mendampingi keluarga miskin dalam wadah kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan, pengadaan pangan dan kebutuhan sosial lainnya;
2. Memberi bantuan kerja melalui kegiatan padat karya untuk memperbaiki sarana dan prasarana wilayah.

Sedangkan pada ruang lingkup pemulihan dari dampak Krisial'08 meliputi tindakan preventif untuk mencegah dan menguatkan daya tahan sosial untuk menghadapi turbulensi sosial. Hal yang pokok dalam kegiatan ini antara lain:

- Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan dengan menciptakan kesempatan kerja dan berusaha yang berkesinambungan.
- Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat dengan tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang mendukung sistem produksi dan distribusi usaha, melalui perkuatan kapasitas LKM setempat.
- Meningkatkan mutu SDM dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi yang adaptif secara ekologis.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna khususnya untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dan jasa lingkungan.

- Mendorong perekonomian dengan membangun kembali sistem ekonomi rakyat.

Program Penyelamatan dari Dampak Krisis'08

Program penyelamatan dari Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat adalah program pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk hibah dan atau pinjaman lunak dan terjangkau untuk memberi bantuan dan mengembangkan lapangan kerja padat karya, terdiri dari:

- Program Berbasis Masyarakat untuk Penyediaan dan Penyaluran Beras dan Sembako Murah untuk Rakyat Miskin serta Peningkatan Gizi bagi Anak dan Ibu Menyusui.
- Program Penciptaan Lapangan Kerja Produktif yaitu Kegiatan Padat Karya Sektor.
- Program Prakarsa Khusus bagi Penganggur Perempuan di Wilayah Pedesaan.
- Program Penyediaan Dana Bantuan Hibah dan atau Dana Bergulir untuk Pendampingan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang Bekerja ke Luar Negeri.

Program Pemulihan Krisis

Program pemulihan adalah program yang dibiayai APBD dan APBN melalui dana alokasi khusus berupa kredit usaha produktif yang mendapat perijinan dari pemerintah dan atau berhak mendapat subsidi bunga untuk peningkatan pembukaan peluang bekerja dan usaha produktif. Program pemulihan krisis terdiri dari:

- Program perluasan kerja masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan, sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Selain investasi publik berjangka panjang, program ini dapat disinergikan dengan dana yang bersumber atau berupa hibah dari CSR perusahaan swasta dan BUMN.
- Program perkuatan permodalan bagi UMK-P untuk mendorong perluasan usaha dalam bentuk kelompok-kelompok produktif yang memproduksi

komoditi ekspor dan substitusi impor yang sumber pembiayaannya dapat merupakan lebaran dari dana perbankan dengan dana bergulir dari APBN.

- Program perluasan usaha melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan komoditas unggulan melalui pengembangan kawasan produktif yang dihasilkan sejalan dengan upaya memelihara kelestarian SDA dan metageologi serta perubahan iklim global. Bantuan pendampingan dapat dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan ekonomi dan manajemen badan usaha desa.

Tata Kelola Organisasi

Koordinasi Hubungan Kerja

Pengembangan tata kelola Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat dimulai dengan pembentukan program khusus dari pusat yang dilaksanakan dan dikelola oleh daerah. Dalam meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan antar instansi dan antar daerah tersebut, dibentuk **Tim Koordinasi** di tingkat pusat oleh Menteri Koordinator yang mampu mensinergikan berbagai aktivitas departemen. Pembentukan ini diikuti oleh pembentukan **Tim Pengelolaan Program** di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota untuk mensinergikan kegiatan SKPD.

Dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi di pusat dan daerah dapat mengembangkan unsur penunjang. Unsur yang penting dalam hal ini adalah memiliki **Pusat Data dan Informasi** yang berfungsi untuk mengelola komunikasi publik dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan **Unit Pengaduan Masyarakat** yang berfungsi untuk menampung, meneliti dan menyampaikan tindakan korektif atas pengaduan yang berasal dari masyarakat atau media massa.

Untuk mengelola pemantauan pelaksanaan yang bebas dari kepentingan, maka Bappenas di pusat dan Bappeda di kabupaten/kota dapat membentuk **Tim Monitoring** yang menyertakan multi-pihak (NGO, swasta dan kelompok-kelompok masyarakat strategis lain) untuk memantau atau mengevaluasi program yang dilaksanakan. Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan transparansi program di daerah.

Pembentukan dan Fungsi Tim Koordinasi

Untuk mencapai tujuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat guna upaya mengendalikan pengangguran akibat Krisis'08, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi di tingkat pusat oleh pejabat setingkat Menteri Koordinator. Tim ini penting dibentuk untuk dapat bergerak cepat dan melakukan koordinasi sektoral dan kesatuan wilayah (kabupaten). Bersama dengan itu, Tim Koordinasi juga dibentuk di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.

Tim Koordinasi berfungsi menetapkan derajat dampak krisis yang dialami wilayahnya dan merumuskan kebijakan dan memberikan arahan umum dalam rangka penyelamatan dan pemulihan kondisi ketenagakerjaan akibat dampak Krisis'08. Dalam melaksanakan fungsinya, tim di tingkat pusat dapat berkonsultasi dengan DPR, BI dan lembaga lain yang dipandang penting perannya dalam menetapkan tingkat kritikalitas situasional dan regional.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan peningkatan pengangguran dan untuk melaksanakan program yang ada, Tim Koordinasi baik pusat maupun daerah mempunyai tugas:

1. Mengevaluasi skala dan dimensi dampak krisis keuangan dan perdagangan global terhadap tingkat pengangguran dan pemiskinan;
2. Menetapkan sasaran dan target program-program Pemberdayaan Daerah dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat di daerah terkait dengan tingkat pengangguran dan pemiskinan serta mekanisme bantuan yang diberikan;
3. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan dan alokasi dana program terutama yang memanfaatkan FPD yang berasal dari anggaran pusat maupun daerah.

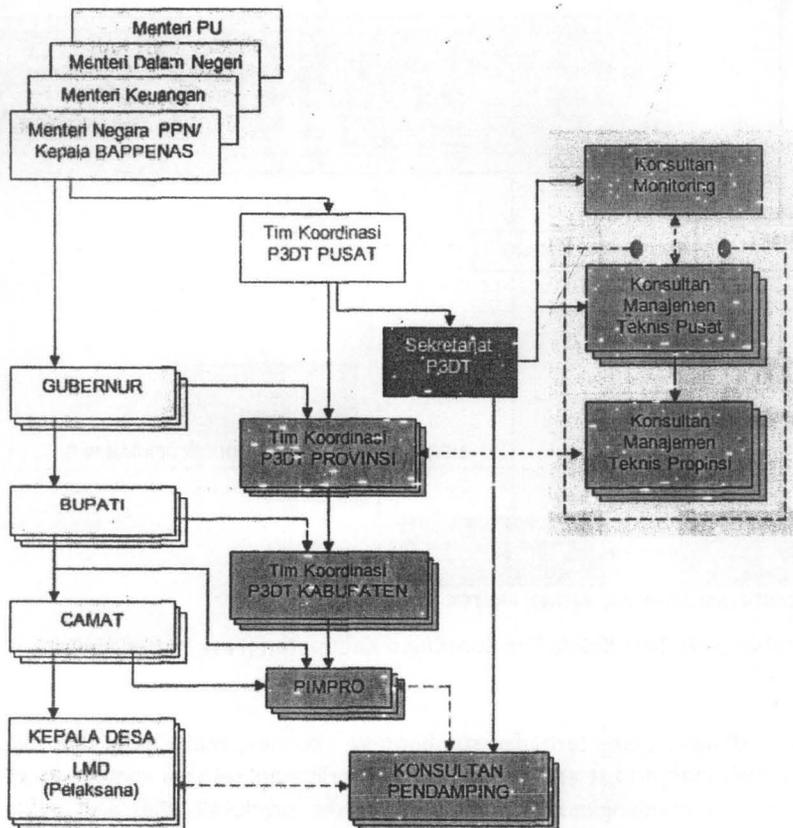
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi baik pusat maupun daerah dapat dibantu oleh sekretariat dan tim pakar sebagai konsultan independen, khususnya dalam:

- Anggaran sekretariat dan tim pakar dapat berasal dari anggaran PNPB, departemen/instansi terkait dan atau lembaga pemerintah non-departemen termasuk BUMN.
- Struktur organisasi dan tugas sekretariat serta tim pakar ditetapkan dengan keputusan Tim Koordinasi

Tim Koordinasi di daerah menyampaikan laporan periodik mengenai upaya penyelamatan dan pemulihan krisis kepada Bupati/Walikota. Sedangkan, Tim Koordinasi di pusat menyampaikan laporan periodik kepada presiden.

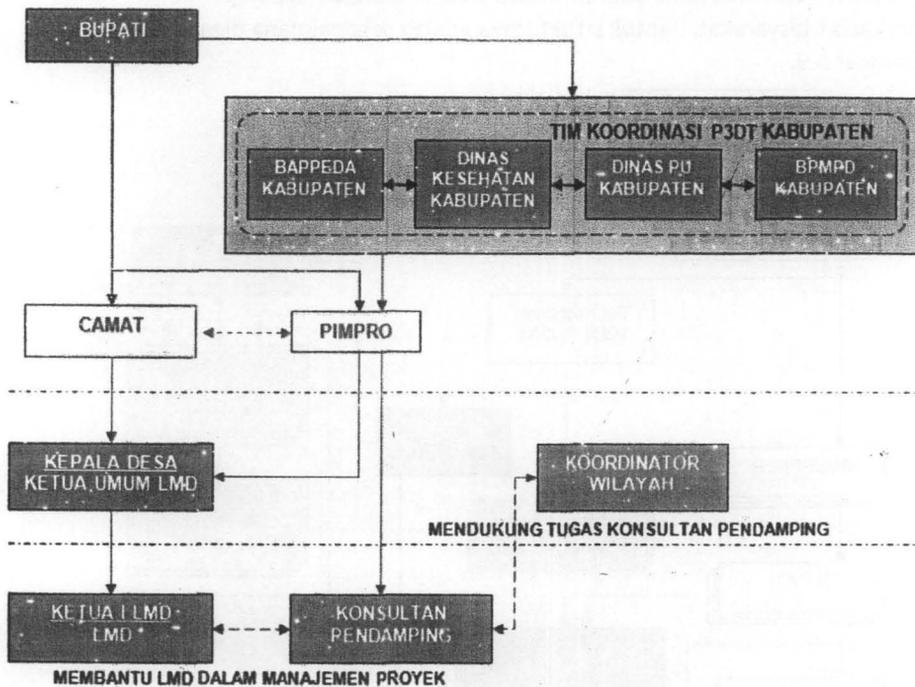
Sistem Penyelamatan dan Pemulihan Krisis

Berdasarkan diskusi-diskusi multi-pihak yang dilakukan, maka dirumuskan bentuk sistem kelembagaan yang perlu dikembangkan guna mengorganisasikan Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat. Bentuk strukturnya adalah sebagaimana digambarkan dalam Gambar 5.9.



Gambar 5.9. Tata Kelola Tim Koordinasi Nasional (Fase Penyelamatan)

Sistem ini direkomendasikan berdasarkan mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam kerangka sistem peningkatan akses atau penguatan kapasitas masyarakat untuk ikut bekerja atau mengelola sebuah usaha produktif. Merujuk Kolopaking (2008), kerangka peningkatan akses berkaitan dengan pengaturan dan tata hubungan antar pihak, yang umumnya hal ini dikenal sebagai upaya pengembangan kelembagaan. Sedangkan, penguatan kapasitas cenderung pada upaya peningkatan kemampuan manajemen dan sumberdaya manusia, sehingga kegiatan sering disebut sebagai *capacity building*.



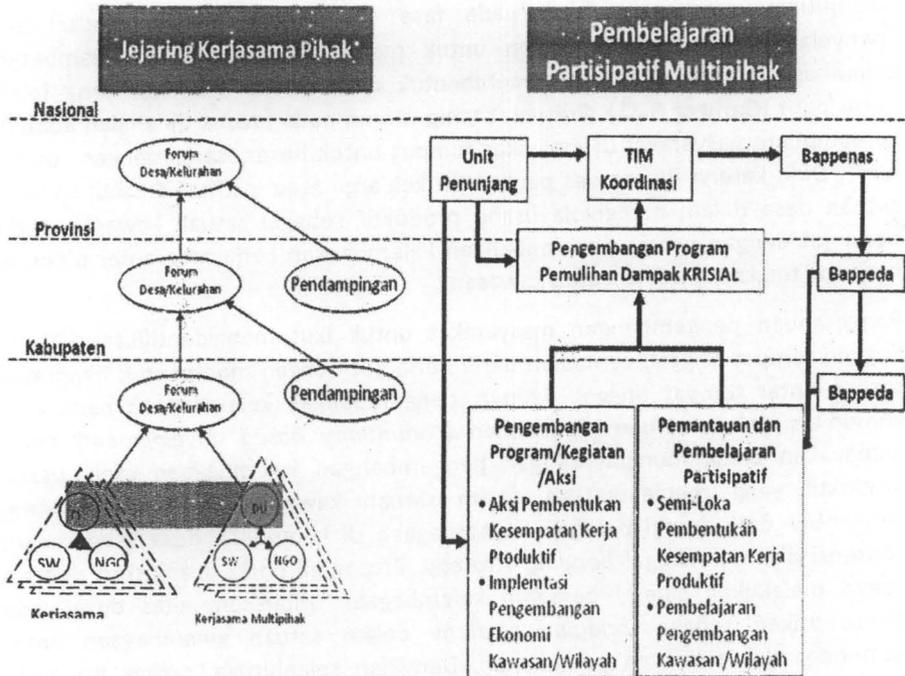
Gambar 5.10. Tata Kelola Tim Koordinasi Kabupaten (Fase Penyelamatan)

Berkenaan dengan akses terhadap sumberdaya ekonomi, maka yang diperlukan pertama oleh masyarakat adalah kepastian keterlibatan sebagai komunitas atau institusi (desa) menjangkau kerja di usaha-usaha produktif atau ikut sebagai anggota masyarakat (pribadi, keluarga dan kelompok) mengelola secara mandiri usaha produktif. Hal ini lebih pada fase penyelamatan.

Selanjutnya, proses diarahkan pada fase “pemulihan” dengan dasar fase “penyelamatan” dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kelembagaan yang ada dalam membentuk usaha-usaha produktif yang lebih partisipatif (Gambar 5.11). Prasyarat yang utama pada proses ini adalah adanya kemampuan masyarakat di aras akar rumput untuk bekerjasama dengan “orang luar”. Oleh karena itu, proses penguatan keluarga atau institusi desa di satuan-satuan desa dalam mengelola usaha produktif sebagai satuan kawasan perlu berlanjut dengan proses pengembangan kelembagaan kerjasama antar pihak di berbagai tingkatan wilayah atau kawasan.

Pengetahuan pengembangan masyarakat untuk ikut mengidentifikasi SDA di lingkup tempat tinggal, kemudian perlu berlanjut dengan membentuk himpunan satuan antar tempat tinggal. Artinya, pengembangan kelembagaan pada aras komunitas dalam satuan pemukiman (*community based development*) perlu diupayakan bersambungan dengan pengembangan kelembagaan usaha-usaha produktif yang memanfaatkan dalam satuan kawasan atau wilayah yang bersumber dari sinergi beragam kelembagaan di komunitas desa yang secara konsepsi disebut sebagai *bonding strategy*. Proses ini perlu dilanjutkan dengan upaya melakukan sinergi beragam kelembagaan antar-komunitas desa yang dikonsepsikan sebagai *bridging strategy* dalam satuan kelembagaan antar komunitas dalam satuan pemukiman. Demikian selanjutnya, proses itu perlu berkait dengan kerjasama pada aras pengembangan kelembagaan usaha produktif secara vertikal antara kelembagaan komunitas perdesaan dengan kelembagaan pelayanan dan keuangan publik disebut sebagai *creating strategy*. Dalam hal ini, kelembagaan semakin kuat apabila ada pengaturan yang semakin resmi.

Dalam konteks pengembangan kelembagaan pengembangan lapangan kerja produktif seperti itu sangat diperlukan “orang luar” yang berperan sebagai pendamping. Dalam prosesnya berkaitan dengan penguatan manajemen untuk masyarakat yang membuka ruang untuk pengembangan proses hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Pengembangan kemitraan ini diarahkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat sebagai simpul pengembangan usaha-usaha produktif. Dalam langkah inilah kemudian perlu diselaraskan upaya pengembangan masyarakat dan desa yang dikembangkan dari “orang luar” atau “atas desa”. Hanya saja, penyambungan ini perlu dikemas dalam sebuah dialog dan kesadaran. Untuk itu, maka prosesnya perlu dikembangkan melalui pendampingan teknis, pengembangan keuangan mikro melalui perluasan jejaring kerjasama multi-pihak dan pengelolaan manajemen kegiatan produktif secara baik.



Gambar 5.11. Tata Kelola Fase Pemulihan (Nasional dan Daerah)

Jejaring kerjasama multi-pihak berbasis masyarakat dan desa hakekatnya adalah pelembagaan untuk pengembangan modal sosial dalam kerangka mewujudkan desa yang berkesejahteraan. Paling tidak, proses ini ditentukan oleh empat faktor. Pertama, soal pengembangan kesiapan keluarga, komunitas di satuan pemukiman untuk membangun kapasitas lembaga/kelompok/komunitas secara swadaya dan bekerjasama dengan pihak lain. Kedua, pemerintahan di aras kabupaten (eksekutif/legislatif) memberi tempat dan membangun kemampuan bekerja dan komunikasi dengan multi-pihak yang melintas asas birokrasi. Ketiga, kemauan dan kemampuan kapasitas dari pengusaha atau lembaga bisnis swasta untuk terlibat mendorong pengembangan masyarakat melalui pola kerjasama baru. Keempat, adanya prakarsa membangun sistem informasi, mekanisme pengawasan sosial secara demokratis yang berbasis masyarakat dan melibatkan kerjasama multi-pihak untuk membangun potensi kerjasama ekonomi. Apabila empat faktor ini berjalan saling menguatkan, maka konsep pengembangan kesempatan kerja produktif yang berkelanjutan akan benar-benar diwujudkan.

Pelaksanaan Padat Karya Keswadayaan Pangan

Kegiatan utama padat karya untuk keswadayaan pangan di wilayah perdesaan adalah perluasan kerja untuk membangun prasarana usaha yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, industri kecil pengolahan hasil, lumbung desa dan perniagaannya dengan mekanisme BLM dan kredit usaha berbantuan kepada kelompok-kelompok produktif, diterapkan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk menanggulangi pengangguran seraya meningkatkan daya beli masyarakat. Kegiatan pendampingan PKL Pangan Sehat di perkotaan yang diupayakan sinergi antara program pemerintah kota dengan program sektoral sejenis serta kredit usaha berbantuan dalam skema subsidi bunga melalui prosedur perbankan maupun pinjaman lunak pada LKM Formal.

Penciptaan Lapangan Kerja Produktif

Kegiatan utama penciptaan lapangan kerja produktif di daerah dengan pendekatan pengembangan kawasan berbasis masyarakat bertujuan untuk mengurangi dampak PHK melalui aktivitas padat karya sektoral terutama di perkebunan rakyat, hutan tanaman rakyat, perikanan laut, pertambakan rakyat dan peternakan rakyat. Kegiatan utamanya adalah penyediaan Dana Bantuan Hibah dan atau Dana Bergulir untuk Pendampingan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang Akan dan Pulang dari Bekerja ke Luar Negeri.

Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan

Kegiatan utama pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan adalah perluasan dan peningkatan efektivitas jalan desa serta jaringan irigasi yang mendukung produksi pangan lokal serta usaha tani yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian ekosistem. Program ini mensyaratkan partisipasi masyarakat yang dapat ditingkatkan melalui kegiatan pendampingan. Program ini dikoordinasikan oleh Departemen PU bersama Deptan dan Depdagri serta dinas-dinas terkait di pemda.

Penguatan Permodalan UMK-P

Kegiatan utama perkuatan permodalan UMK-P yang bergerak di sektor pertanian dari hulu ke hilir adalah penyaluran Dana Bergulir melalui Badan Layanan Umum

serta KUR dari perbankan melalui Lembaga Keuangan Mikro setempat, serta didukung dengan kebijakan pajak dan subsidi bunga sesuai dengan upaya peningkatan aksesibilitas UMK-P. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan BI dan Depdagri. Dalam proses perkuatan permodalan UMKM diperlukan penilaian kelayakan usaha serta penilaian kredibilitas perusahaan oleh lembaga pemeringkat independen yang ditunjuk pemerintah.

Penguatan Kapasitas Masyarakat

Kegiatan utama penguatan kapasitas masyarakat adalah upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan, khususnya di kawasan perdesaan serta mewujudkan kemitraan dengan dunia usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkesinambungan di sektor pertanian. Program ini dikoordinasikan oleh Depdagri serta pemda terkait.

Pemantauan dan Pembinaan Pemerintah

Sebagai kegiatan pemerintah, maka Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat dalam kerangka pengendalian pengangguran akibat Krisis'08 perlu dipantau dan mendapat "pembinaan" dari pejabat pemerintahan. Oleh karenanya, Menteri yang bertanggung jawab di tingkat pusat, Gubernur dan Bupati perlu melaksanakan kegiatan tersebut.

Menteri dan Gubernur wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat. Demikian juga, Bupati/Walikota wajib menyelenggarakan program-program, baik untuk fase penyelamatan maupun pemulihan. Namun, Bupati/Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat. Kepala Desa juga bersama mitra kerja adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat. Pembinaan oleh Gubernur di atas dapat dalam bentuk:

- Koordinasi pengembangan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan.

- Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Pendidikan dan pelatihan pengembangan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Penetapan alokasi dana dalam penyelenggaraan pengembangan, pemantauan dan evaluasi Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati/Walikota dapat dalam bentuk:

- Koordinasi pengembangan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Pemberian pedoman pelaksanaan program-program Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Pendidikan dan pelatihan pengembangan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Penyediaan alokasi dana dalam penyelenggaraan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengembangan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat.

Pendanaan

Sumber pendanaan pemerintah untuk FPD bagi penanganan "dampak" Krisis'08 terhadap ketenagakerjaan berasal dari APBN baik melalui anggaran

departemen/lembaga pemerintah non-departemen maupun dana alokasi khusus yang disalurkan melalui pemda. Penyaluran dana APBN untuk FPD sebagai bagian dari stimulus fiskal bagi Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Ketetapan besaran dan alokasi FPD terkait dengan program-program Bantuan Program Pengembangan Lapangan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat ditetapkan oleh Keppres atas usul Tim Koordinasi di tingkat pusat.

Berdasarkan studi yang dilakukan di empat kabupaten kasus, dengan alasan-alasan keterkaitan sosial, ekonomi dan ekologis, maka dapat diidentifikasi bahwa pemulihan Krisial'08 untuk pembentukan kesempatan kerja dan usaha produktif dapat dilakukan dalam suatu satuan kawasan/wilayah. Pengertian kawasan dapat juga merupakan lintas wilayah, seperti "lintas kecamatan", "lintas kabupaten/kota" dan "lintas provinsi". Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan "ekstra" yang dapat memfasilitasi dibangunnya suatu kerjasama antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan kerjasama antar kabupaten/kota antar provinsi.

Agar pembukaan peluang kerja dan usaha ini produktif dan berlangsung dengan efisien, efektif dan berkelanjutan maka diharapkan pemerintah daerah masing-masing (kabupaten/kota dan provinsi) dapat menganggarkan program pemulihan ini dalam rencana kerja pembangunan melalui APBN dan APBD. Disamping itu, oleh karena prosesnya dilaksanakan melalui suatu proses partisipatif dan melibatkan berbagai pihak berkepentingan, maka terbuka peluang bahwa pembiayaan pengelolaan dan pengembangan usaha produktif bersumber dari anggaran ADD dan sumber-sumber lain dari para pihak yang sah dan tidak mengikat.

Selanjutnya, sinergi pembiayaan perlu dikembangkan tidak hanya terbatas pada peranan dan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi lebih dari itu, peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan lainnya, yakni swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah dan sektor swasta juga sangat dibutuhkan dalam pembiayaan ini. Artinya, tidak hanya sinergi antar kelembagaan dan administrasi pemerintahan tetapi juga sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Disamping itu, seperti telah dikemukakan dalam kajian ini, bahwa penetapan program-program pemulihan Krisial'08 melalui pembentukan usaha produktif dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yakni sejak awal secara institusional komunitas desa merancang suatu perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Dalam beberapa kasus di kabupaten yang dikaji, perancangan tersebut apabila dikehendaki dapat dijadikan RPJMD yang dirancang oleh dan

bersama warga komunitas desa bekerjasama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Melalui pendekatan RPJMD dan RPJM kabupaten atau provinsi serta disinergikan dengan program-program pembangunan berskala besar.

Berdasarkan kemungkinan dan pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan kebijakan yang merupakan insentif kelembagaan dari pemerintah (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) untuk memfasilitasi, melaksanakan, mengelola dan mengontrol proses pemulihan dari Krisis'08 yang berbasis masyarakat. Insentif kelembagaan tersebut yaitu berupa pembiayaan pengelolaan yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Pembiayaan pengelolaan tersebut bukan pendanaan secara sektoral, tetapi pendanaan pembangunan yang disiapkan pemerintah berdasarkan RPJMD dan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan suatu kawasan perdesaan. Oleh karena itu, pendekatan pembiayaan untuk pengelolaan serta pengembangan program dan kegiatan di dalam hal ini dilakukan dengan pendekatan "wilayah" atau kawasan perdesaan. Pada skala mikro dengan berdasarkan pada RPJMD pemerintah kabupaten/kota, provinsi atau pusat menyediakan pembiayaan pembangunan masing-masing komunitas desa. Untuk memfasilitasi dan kontrol, pemerintah juga menyediakan pembiayaan di tingkat kecamatan. Pada skala makro, pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat menyediakan pembiayaan pembangunan pada satuan kawasan perdesaan. Secara finansial, pembiayaan pembangunan pada satuan komunitas desa dan satuan kawasan perdesaan dapat juga disinergikan dengan pendanaan yang disediakan oleh program-program pembangunan skala besar (yang cenderung *top-down*) baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun kelembagaan donor yang bekerjasama dengan pemerintah, swasta maupun LSM.

Dengan demikian, pembiayaan pengelolaan dan pengembangan program pemulihan dapat bersumber dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah provinsi, kabupaten/kota (APBD) dan pemerintah desa (ADD). Dana yang bersumber dari pemerintah tersebut dapat disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari kelembagaan sektor swasta dari CSR, sektor non-pemerintah dan kelembagaan donor yang melaksanakan program-program pembangunan dalam skala besar. Sistem pendanaan yang disebut sebagai *Hybrid Finance System*.

Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pembentukan Kesempatan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat bertumpu pada kesejahteraan rakyat, maka **Faktor Hubungan Publik** menjadi penting. Kajian menyarankan agar diusahakan komunikasi publik yang berkenaan dengan pengelolaan program diupayakan mengurangi kebohongan publik. Melalui FGD yang hasilnya disajikan sebelumnya,

diketahui bahwa peranan pemda untuk mengkomunikasikan kegiatan yang menjadi krusial saat krisis terjadi sangatlah penting.

Dalam kerangka Pembentukan Kesempatan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat setelah fase penyelamatan, paling tidak program-programnya dirancang mempunyai dimensi kesinambungan. Dari dasar ini program-program ini dapat menjadi media juga untuk: (1) Mendorong pembangunan ekonomi daerah yang memiliki fokus sesuai kapasitas ruang dan potensinya; (2) Memfasilitasi munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru; (3) Memberdayakan masyarakat dan desa agar dapat menggali, merdayagunakan dan melestarikan potensi-potensi yang ada untuk kemakmuran; (4) Mendorong usaha-usaha ekonomi rakyat yang memiliki *linkage* yang kuat dengan basis dan potensi kawasan perdesaan dan memfasilitasi akses produksi usaha rakyat terhadap pasar; (5) Mengembangkan kapasitas manajemen usaha ekonomi rakyat dan kelembagaan keuangan mikro kawasan perdesaan dan (6) Memfasilitasi penguatan partisipasi pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa serta masyarakat dalam proses kebijakan publik lokal dalam kaitannya dengan pembangunan daerah.

Pengembangan kelembagaan pembangunan dari pemulihan dari Krisis'08 merupakan "media" penting dalam mempertautkan antara potensi dan aktivitas pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan untuk pengembangan kelembagaan pembangunan yang dalam hal ini diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dalam komunitas, antar-komunitas dan aksesibilitas terhadap kelembagaan pelayanan, keuangan dan pendanaan publik (*public financial and services*). Kebijakan tersebut difokuskan kepada proses pembelajaran partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama (kolektif) yang produktif oleh kelembagaan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, kelembagaan usaha ekonomi kecil, badan usaha milik desa dan koperasi di dalam komunitas desa, antar-komunitas desa dan dengan kelembagaan publik lainnya di luar kawasan perdesaan.

Proses ini diharapkan selanjutnya dapat memperkuat hubungan dan difokuskan kepada upaya-upaya untuk memberikan insentif-insentif kelembagaan (*institutional incentives*) berupa kebijakan dari pemerintah pusat dan lokal (provinsi dan kabupaten) untuk menciptakan "ruang" bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Proses-proses kebijakan ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan lokal (provinsi dan kabupaten). Proses kebijakan kelembagaan ini selanjutnya dapat menguatkan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) melalui implementasi program-program pemberdayaan dan peningkatan partisipasi warga komunitas. Secara institusional, program-program

pemberdayaan dan peningkatan partisipasi komunitas pedesaan tersebut adalah untuk memperkuat kelembagaan lokal, seperti kelembagaan kelompok tani sehamparan dan kelembagaan koperasi sebagai mitra pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka kerjasama dan kesetaraan. Proses yang mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik di dalam pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

- Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia sudah berada dalam kondisi krisis bahkan sebelum terjadinya Krisis'08. Hal ini terutama terjadi di pedesaan yang justru memiliki lebih banyak angkatan kerja dibanding kawasan perkotaan. Kondisi ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang dianut oleh pemerintah, khususnya sepanjang era orde baru yang lebih mengedepankan pertumbuhan dibandingkan pemerataan sehingga timbul pola-pola pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat—khususnya di pedesaan dan pertanian sebagai corak utama perekonomian Indonesia. Pembangunan dilakukan bukan dengan memperkuat sistem industri berbasis pertanian melainkan lebih mengandalkan eksploitasi SDA dan penerapan teknologi. Sayangnya, tanpa pengawalan dan perlindungan dari aspek legal formal, maka proses yang ada justru mendorong masuknya kapital ke pedesaan dalam jumlah besar yang pada gilirannya telah meminggirkan masyarakat desa dari pembangunan di daerahnya sendiri sebagai akibat dari penguasaan lahan mereka yang semakin lama semakin sempit. Sebuah proses pembangunan yang, sayangnya, tidak diikuti oleh demokratisasi peran masyarakat dan desa. Dari sini, masyarakat desa kemudian menciptakan sendiri peluang bekerja mereka, utamanya melalui proses migrasi bekerja ke luar daerah mereka yang tidak hanya saja berhenti sampai di kawasan perkotaan Indonesia, tapi juga lebih jauh telah mendunia ke berbagai negara. Krisis'08 oleh karenanya dapat memperberat beban masyarakat dan desa karena dikhawatirkan dampak krisis yang melanda negara-negara tempat tujuan bekerja dan pabrik-pabrik di perkotaan Indonesia yang berorientasi komoditi ekspor telah mendorong PHK besar-besaran. Hal ini akan “mencetak” banyak sekali pengangguran yang bila mereka kembali ke desa asal mereka maka desa tidak akan mampu memberikan peluang kerja yang cukup.
- Kajian di sejumlah daerah di Indonesia mendapati adanya ragam besaran dan dampak yang dirasakan dunia ketenagakerjaan sebagai reaksinya terhadap

Krisial'08. Hal itu tidak terlepas dari ciri ketenagakerjaan dan dunia usaha yang berkembang di masing-masing daerah. Kalimantan Barat dan Riau misalnya, memiliki ciri ekonomi pertanian pedesaan yang mengandalkan komoditas berorientasi ekspor yaitu karet dan kelapa sawit. Selama ini banyak perkebunan yang terdapat di kedua provinsi tersebut telah menyerap sejumlah besar tenaga kerja pedesaan. Di kedua provinsi ini, dampak Krisial'08 sangat terasa. Pada awal Januari lalu, nilai ekspor kedua komoditas tersebut jatuh sangat drastis, menyebabkan banyaknya petani dan pekebun sawit yang sampai terpaksa menjual lahan kebunnya karena tidak mampu membayar kredit kepada bank. Tenaga kerja yang terserap di perkebunan-perkebunan tersebut pun menjadi penganggur karena bahkan biaya untuk memetik buah sawit yang ada di pohon pun tidak dapat tertutupi oleh harga penjualannya. Pada fase ini dicatat sejumlah besar tenaga kerja pedesaan di Riau berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan lain, mereka umumnya menjadi buruh bangunan dan masuk ke sektor informal. Belakangan, ketika nilai rupiah mulai menguat mengikuti harga minyak dunia, maka nilai jual kedua komoditas ini mulai membaik meskipun belum mencapai harga sebagaimana sebelum terjadinya krisis. Hal lain yang menyebabkan kedua daerah ini juga merasakan dampak Krisial'08 terkait lokasinya yang berbatasan dengan negara Malaysia. Riau berbatasan dengan Negara Bagian Johor dan Negeri Sembilan sedangkan Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak. Ketika TKI yang bekerja di Malaysia mengalami PHK di tempat bekerjanya, mereka tidak kembali ke daerah asal mereka semula, akan tetapi bertahan di kawasan perbatasan, termasuk kedua provinsi ini. Alasan para TKI ini bertahan umumnya adalah karena mereka tidak mempunyai biaya untuk pulang ke daerah asal serta menunggu jika kondisi krisis telah membaik dan Malaysia kembali membutuhkan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan kedua daerah ini menjadi kantong-kantong baru bagi penganggur eks-TKI yang sedang menunggu untuk diberangkatkan kembali ke Malaysia. Kondisi tersebut berbalik dengan kondisi yang dialami oleh daerah pengirim TKI. Kajian mempelajari fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Kedua daerah ini dikenal sebagai daerah pengirim TKI dalam jumlah besar. Namun dampak krisis justru tidak dirasakan oleh kedua daerah tersebut. Nilai remitan yang dikirimkan oleh TKI ke daerah asal mereka sempat mengalami penurunan yang signifikan selama beberapa bulan, namun hal itu berangsur-angsur kembali normal seiring kembalinya para TKI bekerja di Malaysia.

- Beragam dampak Krisial'08 terhadap ketenagakerjaan yang dialami oleh berbagai daerah, beragam pula cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk

menghadapinya. Tingkat resistensi yang tinggi dari masyarakat membuat mereka mampu bertahan dalam kondisi krisis. Mereka kemudian mengembangkan berbagai cara dalam membuka lapangan kerja baru. Namun dari semua kajian yang ada, satu pola utama yang muncul adalah bahwa—seperti juga yang terjadi pada Krismon'97/98—sektor informal, khususnya di perkotaan kembali menjadi mekanisme penyelamat bagi tenaga kerja pedesaan yang menganggur. Pekerjaan-pekerjaan seperti buruh bangunan, PKL, sopir ojek, pengrajin dan pelaku industri kecil tumbuh di perkotaan dan menyerap banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di pedesaan. Pelajaran yang bisa diambil dari poin kesimpulan 2 dan 3 adalah bahwa besaran dampak serta upaya masyarakat dalam mengatasi dampak Krisis'08 terhadap ketenagakerjaan berbeda-beda antar daerah di Indonesia. Hal yang membedakan terutama: (1) Jenis komoditas pertanian yang umumnya diusahakan di pedesaan, semakin komoditas tersebut berorientasi ekspor maka semakin rentan daerah tersebut mengalami dampak krisis dan (2) Aspek lokasi geografis, semakin dekat sebuah daerah ke kawasan perbatasan (khususnya darat) negara, khususnya Malaysia dan Singapura, maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut menjadi kantong eks-TKI yang dipulangkan dan bertahan tidak kembali ke daerah asal namun justru menunggu kembali ke negara asal tujuan bekerja.

- Untuk mengatasi permasalahan itu dan menjaga agar krisis ekonomi yang terjadi tidak berdampak lebih parah kepada krisis ketenagakerjaan, maka perlu dirancang sebuah prosedur protokol yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan sebagai langkah penyelamatan. Pengaturan itu perlu peka terhadap bentuk permasalahan yang terjadi di setiap daerah sehingga oleh karenanya perlu dilakukan tidak secara terpusat melainkan memberi ruang kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah. Kajian ini merekomendasikan perlunya legalitas untukantisipasi dampak krisis ekonomi yang berimbas kepada krisis ketenagakerjaan melalui penetapan peraturan. Peraturan ini menjadi sebuah protokol yang kuat secara legal formal dalam kerangka mengatasi dampak krisis terhadap ketenagakerjaan. *Draft* peraturan itu diberi nama **Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Pembentukan Kesempatan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat**.

Implikasi Kebijakan

- Untuk pelaksanaan berbagai upaya dari **Program Pemberdayaan Daerah dalam Pembentukan Kesempatan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat**

tersebut perlu dimungkinkan pemberian **FPD** yang dicadangkan dari anggaran stimulus fiskal. Adapun alokasi penggunaan dana APBN untuk penyelamatan dan pemulihan krisis harus mendapat persetujuan dari DPR.

- Dalam meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan antar instansi dan antar daerah, dibentuk **Tim Koordinasi** di tingkat pusat oleh Menteri Koordinator yang mampu mensinergikan berbagai aktivitas departemen. Pembentukan ini diikuti oleh pembentukan **Tim Pengelolaan Program** di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota untuk mensinergikan kegiatan SKPD.
- Unsur penunjang yang melekat pada tim koordinasi adalah **Pusat Data dan Informasi** yang berfungsi untuk mengelola komunikasi publik dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan **Unit Pengaduan Masyarakat** yang berfungsi untuk menampung, meneliti dan menyampaikan tindak korektif atas pengaduan yang berasal dari masyarakat atau media massa.
- Untuk kepentingan pemantauan pelaksanaan, maka Bappenas di pusat dan Bappeda di kabupaten/kota dapat membentuk **Tim Monitoring Independen** yang menyertakan multi-pihak (NGO, swasta dan kelompok-kelompok masyarakat strategis lain), sebagai upaya meningkatkan transparansi pelaksanaan program di daerah.
- Naskah kebijakan tentang **Program Pemberdayaan Daerah dalam Pembentukan Kesempatan Kerja Produktif Berbasis Masyarakat** pada proses legalisasinya dapat diawali dalam wujud Peraturan Menteri dan pada saatnya berbentuk UU.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 1996. Sakernas Tahun 1995. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. 2007. Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. 2008. Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota Tata Cara Penghitungan Menurut Lapangan Usaha Buku 2. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. 2009. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Desember 2001 - Januari 2009. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. 2009. Perkembangan Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1976-2009 (Bappenas). Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Bambang, T. dan Ali Said. 2002. Konsep Desa dan Perkotaan: Keterbandingan Antar Sensus. Pedoman Analisis Sensus Penduduk 2000. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

- Bernhard, W. T. et al. 2003. *The Political Economy of Monetary Institution*. MIT-Press: Cambridge.
- Bhargwati, J. 1991. *Political Economy and International Economics*. MIT-Press: USA.
- Carrico, M. A. et al. 1989. *Building Knowledge System: Developing and Managing Rule-based Application*. Mc Graw Hill Book Pub: NY.
- Cashways, B. 1994. *Human Resource Management* (terjemahan). Gramedia: Jakarta.
- Cooperrider, David dan Diana Whitney. 2001. *Appreciative Inquiry Fostering Wholeness in Organization: A Store of Nutrimental in Brazil*.
- Departemen Perindustrian. 2008. *Kebijakan Pembangunan Industri Nasional*. Jakarta.
- Der Haar dan Hosking. 2004. *Change Works: A Critical Construction*. In J.Boonstra (Ed.), *Dynamic of Organization Change and Learning*. Chicester: Wiley.
- Eriyatno dan Fajar Sofyar. 2007. *Riset Kebijakan*. IPB-Press: Bogor.
- Godel, M. 2001. *Creating Futures: Scenario Planning as A Strategic Management Tool*. Economica Pub: USA.
- Heron, J. 1996. *Cooperative Inquiry-Research into Human Condition*.
- Holtz – Eakin, D dan H.S. Rosen. 2004. *Public Policy and the Economics of Entrepreneurship*. MIT-Press: Cambridge.
- Kartodirdjo. 2001. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Gramedia: Jakarta.
- Kartohadikoesoemo, S. 1953. *Desa*. PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2009. *Kinerja Perekonomian 2004-2009*.
- Kolopaking, L.M. 2000. *International Migration and The Development of The Sending Region*. Disertation in University Science Malaysia.
- _____. 2003. *Kajian Pengembangan Prosedur Pelayanan Konseling Buruh Migran Perempuan di Malaysia*. Hongkong, Arab Saudi.
- _____. 2003. *Pemberdayaan Tenaga Kerja Migran dan Kelembagaan Koperasi dalam Pembangunan Pedesaan*.
- _____. 2005. *Kajian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Komunitas di Indonesia Kasus Program P2KP*.
- _____. 2006. *Pengembangan Mekanisme Pembiayaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madya Bogor*.
- _____. 2007. *Peningkatan Kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pemodelan Visualisasi Negara Tujuan TKI*.
- _____. 2008. *TOR 6 Pengembangan Materi Untuk dan Pengkonsolidasian Hasil Workshop Multistakeholder di Tiga Negara Tujuan*.
- _____. 2009. *Studi Pengembangan Protokol Pengendalian Pengangguran Akibat Krisis Keuangan Global untuk Pencegahan Pemiskinan*.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Nugraha, S. 1998. *Profil Penduduk per Propinsi Tahun 1997: Propinsi Jawa Barat*. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN: Jakarta.
- Pierce, George.R. 2008. *Client Satisfaction for Wealth Management*. Seattle Magazine.
- PSP3-LPPM IPB. 2004. *Hasil Workshop PRSP: Upaya Strategis Mengurangi Kemiskinan di Pertanian*. PSP3-LPPM IPB: Bogor.

- Sajogyo. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.
- Schumacher, E. F. 1993. *Small is Beautiful*. Vintage Pub: London.
- Siregar, H. dan Siti Masyitho. Krisis Finansial Global dan Implikasinya pada Sektor Agribisnis Indonesia 2009, Jurnal Agrimedia. Volume 13 No. 2, Desember 2008.
- Soewardi, K. dan Kodiran T. 2009. Pembangunan Pertanian-Kelautan sebagai Platform Pembangunan Nasional. Makalah DGB-IPB.
- Suparno, E. 2008. Paradigma Baru Transmigrasi. Depnakertrans.
- Tambunan. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Tim Koordinasi Pengelolaan Program-Program Jaring Pengaman Sosial. 2000. Program-Program Jaring Pengaman Sosial 1999/2000.
- Tjondronegoro. 1984. *Social Organization and Planed Development in Rural Java: A Study of The Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java*. Oxford University Press: Singapore.
- _____. 2007. The 73rd International Symposium on Sustainable Humanosphere.
- Zwicky, A.M. 1997. Licensing of Prosodic Features by Synthetic Rules: The Key to Auxiliary Reduction.